

Majalah



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

Mengawal Rakyat Pulang Kampung



EDISI 244
APRIL
TH. 2025



E-Media
DPR RI

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos, M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

LAPORAN UTAMA



Mengawal Rakyat Pulang Kampung

4

PROLOG

Mengawal Rakyat Pulang Kampung

6

LAPORAN UTAMA

- Penurunan Mobilitas mudik Cermin Ekonomi Terhimpit
- Pemudik 2025 Capai 146,48 Juta
- Lebaran 2025 : Aman dan Terkendali
- Arus Mudik 2025 yang Terbaik

16

SUMBANG SARAN

Paradoks Kebijakan Mudik dalam Menjawab Kebutuhan Mobilitas Rakyat

18

PENGAWASAN

Polemik Sengketa Lahan SHM Yang Selalu Meresahkan

20

ANGGARAN

Efisiensi Anggaran Demi Kepentingan Publik

22

LEGISLASI

Revisi Tatib DPR Perkuat Pengawasan

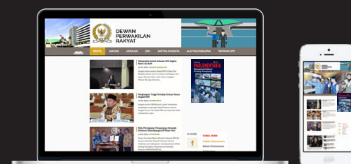
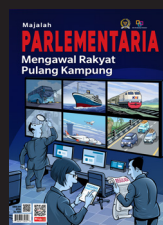
24

FOTO BERITA

28

PROFIL

Didik Haryadi Mendedikasikan Diri Untuk Rakyat



PENGAWASAN

**Polemik
Sengketa Lahan
SHM Yang Selalu
Meresahkan**

18

PIMPINAN KOMISI II DPR RI

SOROTAN

**Mencari Solusi Kisruh
Penerimaan Mahasiswa Baru**

58

PIMPINAN

Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIA

Ketua Komisi X DPR

ANGGARAN

20

**Efisiensi Anggaran
Demi Kepentingan
Publik**

32 **KUNKER**

58 **SOROTAN**
Mencari Solusi Kisruh Penerimaan
Mahasiswa Baru

60 **LIPUTAN KHUSUS**
DPR RI Rumah Perjuangan Palestina

62 **DAFIL**

70 **PERNIK**
Parlementaria Raih Penghargaan
Bergengsi

72 **KIAT SEHAT**
Cegah Neck Pain Syndrome Akibat
Ketergantungan Gadget

74 **WISATA**
Lancangan Kuning dan Jejak Sejarah di
Pekanbaru

76 **LENSA PARLE**
Niat Menata, Malah Antrean Merajalela

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



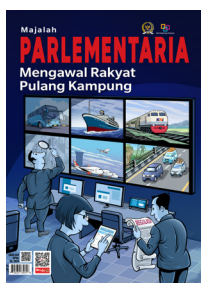
@dpr_ri

www.dpr.go.id

Mengawal Rakyat Pulang Kampung



Makna Idulfitri sesungguhnya adalah kembali ke fitrah—sebuah perjalanan spiritual yang mengajak setiap individu menyucikan diri, memperbaiki hati, dan mempererat hubungan antarsesama. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lebaran adalah momen emas merekatkan kembali hubungan antar pemerintah dan rakyatnya.



BAGI DPR RI, perayaan ini bukan sekadar gema takbir dan tradisi silaturahmi, melainkan juga memperbarui komitmen

terhadap nilai-nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan yang inklusif. Kepercayaan publik merupakan aset utama yang harus terus dijaga. Maka, refleksi Idulfitri menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan, langkah, dan keputusan negara harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Lebaran 2025 datang dalam suasana yang penuh dinamika. Transisi politik pasca-pemilu masih terasa, namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia senantiasa tangguh menghadapi berbagai tantangan. Lebaran pun hadir sebagai pemulih semangat kolektif, sebagai momen harapan di tengah tekanan hidup yang belum sepenuhnya pulih.

DPR RI secara aktif memantau dan mengawal berbagai isu menjelang Idulfitri 1446 H, terutama terkait biaya hidup, infrastruktur mudik, serta perlindungan terhadap para pekerja. Melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, DPR RI berkomitmen memastikan bahwa Ramadan dan lebaran dapat dijalani masyarakat secara aman, layak, dan terkendali.

“

Lebaran pun hadir sebagai pemulih semangat kolektif, sebagai momen harapan di tengah tekanan hidup yang belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga riset dan pemantauan pasar, biaya perjalanan mudik tahun ini mengalami kenaikan signifikan. Rata-rata keluarga Indonesia harus menyiapkan dana antara Rp3 juta hingga Rp5 juta untuk perjalanan ke kampung halaman, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp4 juta.

Penyebab kenaikan ini antara lain, naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), tarif angkutan umum, serta biaya operasional kendaraan pribadi. Kondisi ini menimbulkan beban tersendiri, terutama bagi kalangan pekerja, buruh, dan pelaku UMKM.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa seluruh komisi di DPR telah diinstruksikan meningkatkan pengawasan serta

menyampaikan masukan konkret kepada pemerintah. “Lebaran bukan hanya soal perayaan, tapi juga ujian kepemimpinan dan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Kami akan memastikan setiap kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” ujar Puan.

Selain transportasi, DPR RI juga menerima banyak aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok. Data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa harga beras, minyak goreng, gula, dan daging mengalami lonjakan yang memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Seluruh Komisi terkait di DPR RI mendorong pemerintah melakukan operasi pasar secara masif, memastikan distribusi logistik berjalan lancar, serta mempercepat bantuan bagi kelompok rentan. DPR RI juga melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan infrastruktur mudik, termasuk rest area, SPBU, jalur tol, serta moda transportasi publik.

Dengan tantangan ekonomi yang cukup kompleks, mulai dari inflasi, lonjakan harga, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), DPR RI menyatakan komitmennya tetap menjadi penyeimbang yang berpihak kepada rakyat. Segala bentuk pengawasan dan pengambilan kebijakan diarahkan agar Idulfitri 2025 tetap dapat dirayakan dengan khidmat dan penuh keberkahan oleh seluruh masyarakat.

Menutup pernyataan, Puan menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan nasional. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas selama arus mudik dan balik, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membantu sesama.

“Kami ingin memastikan lebaran menjadi momentum kebersamaan, bukan kesenjangan. Negara harus hadir secara konkret di tengah rakyat,” pungkasnya.

Penurunan Mobilitas Mudik Cermin Ekonomi yang Terhimpit

Tradisi mudik pada tahun 2025 ini memperlihatkan fenomena yang mengkhawatirkan. Data proyeksi survei dari Kementerian Perhubungan menunjukkan potensi penurunan signifikan jumlah pemudik hingga 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini cermin ekonomi masyarakat sedang terhimpit.



JIKA pada Lebaran 2024 diprediksi sebanyak 193,6 juta jiwa melakukan perjalanan, kini angkanya diperkirakan hanya sekitar

147 juta. Sinyal pelemahan ini diperkuat dengan menurunnya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebesar 6 persen dan avtur sebesar 4 persen. Penurunan kedua indikator ini mengindikasikan ada penurunan mobilitas fisik masyarakat, yang secara tidak langsung mencerminkan melemahnya daya beli dan semangat untuk melakukan perjalanan mudik.

Penurunan mobilitas ini dipandang bukan sekadar anomali, melainkan cerminan dari kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terhimpit. Meskipun inflasi Maret tercatat melandai di angka 1,65 persen *month-on-month* (mom),

harga kebutuhan pokok di lapangan masih terasa tinggi. Kenaikan upah pun dinilai tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup yang terus terjadi.

Dalam situasi seperti ini, biaya mudik yang meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga oleh-oleh menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Akibatnya, tidak sedikit yang memilih untuk tetap tinggal di perantauan demi menjaga stabilitas keuangan.

Estimasi kerugian ekonomi akibat potensi penurunan pergerakan hingga 46 juta orang diperkirakan mencapai antara Rp93 triliun hingga Rp232 triliun. Angka ini menggambarkan hilangnya potensi stimulus ekonomi yang seharusnya tersalurkan ke daerah-daerah, terutama wilayah pedesaan dan kota-kota kecil yang menjadi tujuan utama mudik.

Sektor-sektor seperti warung makan, toko kelontong, penginapan, dan jasa transportasi lokal berpotensi kehilangan momentum peningkatan

pendapatan tahunan mereka. Tekanan pada daya beli menjadi penyebab utama fenomena ini. Stagnasi upah, ketidakpastian lapangan kerja, dan harga pangan yang masih tinggi memaksa masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran.

Mahalnya biaya tol, tiket transportasi, dan akomodasi lebaran juga menjadi pertimbangan besar. Meskipun pemerintah telah menyediakan program mudik gratis, cakupannya dinilai masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri, menilai, penurunan daya beli masyarakat selama Lebaran 2025 sebagai sinyal serius adanya tekanan ekonomi yang semakin nyata dirasakan oleh rakyat.

“

Belanja turun, pemudik berkurang, uang tak banyak beredar. Ini bukan soal preferensi, tapi bukti bahwa rakyat makin berat hidupnya

M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

la menekankan bahwa momen lebaran yang seharusnya menjadi pemicu optimisme justru diwarnai kekhawatiran dan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.

"Belanja turun, pemudik berkurang, uang tak banyak beredar. Ini bukan soal preferensi, tapi bukti bahwa rakyat makin berat hidupnya," ujar Hanif saat dihubungi awal April lalu. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan, jumlah pemudik turun hingga 24 persen dibanding tahun lalu. Realisasi penukaran uang baru di Bank Indonesia pun hanya sekitar 30 persen dari total yang disiapkan.

Sementara itu, indikator lain seperti deflasi Februari dan penurunan Indeks Penjualan Riil juga memperkuat

sinyal bahwa konsumsi rumah tangga sedang melambat. Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019 ini mengingatkan bahwa stabilitas makro ekonomi tidak akan berarti jika tidak sejalan dengan realitas ekonomi rakyat di bawah.

"Pertumbuhan ekonomi boleh naik, tapi jika rakyat menahan belanja, itu artinya mereka merasa tidak aman. Banyak orang sekarang hanya membeli yang paling perlu," tutur Hanif.

Menurutnya, hal ini harus jadi perhatian serius pemerintah. Dia

mengingatkan, jangan sampai pemerintah merasa baik-baik saja hanya karena angka makro terlihat bagus.

Hanif mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial, penguatan subsidi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar, serta dukungan konkret bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan pekerja informal yang menopang ekonomi rakyat.

"Negara harus hadir lebih kuat dan lebih konkret. Jangan biarkan rakyat bertahan sendiri menghadapi tekanan ekonomi. Ini soal kepercayaan publik. Kalau negara tak cepat merespons, yang runtuh bukan hanya daya beli, tapi juga harapan," ujar Hanif.

— rnm/mh

Wakil Ketua Komisi XI DPR
M. Hanif Dhakiri.



Foto: Farhan/vel

Pemudik 2025 Capai 146,48 Juta

Pemerintah telah memproyeksikan jumlah pemudik pada Idulfitri 2025 mencapai 146,48 juta orang dengan menggunakan berbagai jenis moda transportasi. Komisi V DPR RI yang mengawasi arus mudik, memastikan mudik aman, lancar, dan nyaman.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras.



MENGUTIP laporan Buku Ekonomi Kita edisi Maret 2025, mayoritas pemudik memilih menggunakan kendaraan

pribadi, dengan persentase mencapai 23 persen dari total pemudik. Moda transportasi lainnya yang banyak

digunakan adalah bus sebanyak 16,9 persen, kereta api antarkota sebanyak 16,1 persen, dan pesawat sebanyak 13,5 persen.

Sementara pemudik yang menggunakan kapal laut Pelni tercatat sebesar 2,2 persen dan kapal penyeberangan ASDP sebanyak 2,1 persen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyerukan pentingnya kesiapan infrastruktur dan transportasi publik

demikian kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan insentif berupa diskon tarif tol dan potongan harga tiket pesawat.

"Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat. Tentunya kita patut memberikan apresiasi," ujar Iwan. Selain pemberian insentif, pemerintah juga tengah menyiapkan pengerjaan jalan tol dan jalan nasional lintas utama sepanjang 3.020,5 km, serta jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 km yang diklaim telah berada dalam kondisi optimal. Sebanyak 95,22 persen jalan nasional lintas utama dinyatakan layak dilalui.

Iwan meminta pemerintah mempercepat penyelesaian pengerjaan infrastruktur agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman. "Pastikan seluruh pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan nasional selesai sebelum libur Lebaran. Mengingat saat ini masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan juga infrastruktur drainase di jalan tol maupun jalan arteri," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut, Maret silam.

Senada, Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mendorong pemerintah melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat calon pemudik agar mudik berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman. "Terkait peningkatan transaksi di pintu tol, perlu dipastikan sensitivitas layar tap e-toll berfungsi baik untuk mempercepat transaksi dan menghindari antrean panjang. Pastikan juga saldo e-toll pemudik mencukupi sebelum memasuki gerbang tol," ujar Reni.

Ia mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyediakan *counter* pengisian saldo e-toll di rest area, dilengkapi dengan fasilitas QRIS dan mobile banking, serta melakukan sosialisasi agar proses pengisian berlangsung cepat. Potensi



Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.

penumpukan kendaraan di rest area pun perlu dimitigasi lebih awal.

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol menyaratkan tidak boleh ada lubang di sepanjang jalan tol. Pada H-10 arus mudik, diharapkan tidak ada lagi jalan berlubang, jalan bergelombang yang membahayakan, angkutan barang (selain sembako dan BBM) yang melintas di jalan tol, ataupun perbaikan jalan yang berlangsung saat arus mudik," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memastikan kelayakan seluruh moda transportasi, khususnya transportasi laut, menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025. Ia menyebut, terdapat potensi lonjakan penumpang kapal penyeberangan hingga 50 persen dibanding musim mudik tahun lalu.

"Kapal laut menjadi pilihan utama bagi pemudik di wilayah kepulauan dan daerah yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan memadai. Pemerintah wajib memastikan seluruh kapal dalam kondisi layak, aman, dan nyaman bagi penumpang," kata Irine.

Kementerian Perhubungan mencatat, pergerakan pemudik mulai meningkat sejak H-9 atau Sabtu (22/3/2025), khususnya pada moda kereta api dan kapal feri yang mengalami lonjakan lebih dari 50 persen. Irine juga menyoroti masih banyaknya kapal tua yang dioperasikan tanpa perawatan optimal, sehingga berisiko mengalami

kendala teknis seperti mesin mogok atau kebocoran saat perjalanan.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan implementasi regulasi kelayakan kapal secara maksimal. "Dalam beberapa kasus, kapal yang tidak layak tetap dioperasikan karena lemahnya pengawasan. Pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada operator yang melanggar, termasuk pencabutan izin operasional jika ditemukan pelanggaran serius," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia juga meminta agar pemerintah mengawasi harga tiket agar sesuai ketentuan dan mencegah praktik calo serta penipuan tiket palsu. Selain itu, ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci harus dipastikan mencukupi bagi seluruh penumpang.

Irine mengingatkan bahwa kondisi cuaca buruk seperti gelombang tinggi dan angin kencang sering kali menjadi ancaman, khususnya bagi kapal yang tidak memiliki spesifikasi memadai. Untuk itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi intensif dengan BMKG agar peringatan dini dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.

um/mh



Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti.

Lebaran 2025: Aman dan Terkendali



Ketua DPR RI Puan Maharani.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, DPR RI meyakini bahwa Idulfitri menjadi momen sakral, yang mengingatkan rakyat Indonesia bahwa ini tidak sekadar kemenangan spiritual, namun juga menjadi momen memperkuat kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara.



PEMERINTAH melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari

Senin, 31 Maret 2025, sesuai hasil sidang isbat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan selamat Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Indonesia.

"Indonesia adalah rumah bagi keberagaman. Mari kita jadikan semangat Idulfitri ini sebagai pemicu untuk semakin memperkuat

kebersamaan dan toleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menjaga persatuan bangsa," kata Puan.

Secara khusus, cucu Bung Karno itu mengingatkan masyarakat yang mudik untuk selalu berhati-hati selama dalam perjalanan, dan terus menjaga kesehatan. "Hati-hati di jalan, tidak perlu terburu-buru. Pastikan fisik dalam kondisi sehat. Jangan lupa juga asupan makanan dan istirahat yang cukup selama di perjalanan," serunya.

Puan juga mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan, mengingat saat ini sebagian wilayah Indonesia masih menghadapi cuaca

ekstrem. Tidak hanya itu saja, dirinya menyampaikan agar pemerintah dan pemangku kepentingan tetap mengawal dan menjaga keselamatan para pemudik selama di perjalanan.

Ia berharap, masyarakat dapat menikmati silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga di momen Idul Fitri dalam suasana gembira. "Seluruh pihak terkait harus menyiapkan seluruh kebutuhan, rest area, dan lain-lain sebagainya selama perjalanan di arus mudik ini, sehingga fasilitas yang dibutuhkan para pemudik terjaga dan tersedia," ucap politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan itu.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir ikut memberi penilaian bahwa

pelaksanaan mudik Idulfitri 1 Syawal 1446 merupakan yang terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Secara khusus, Adies menyoroti minimnya tingkat kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran tahun ini.

Perlu diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaporkan sebanyak 2,16 juta kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode 21 Maret-1 April 2025. Angka ini naik 28,1 persen dibandingkan lalu lintas normal dan 0,6 persen lebih tinggi dari Lebaran 2024. Sementara hingga 7 April, lebih dari satu juta kendaraan roda empat telah kembali ke Jakarta setelah mudik lebaran 2025.

Pada periode 31 Maret-5 April 2025, perusahaan pengelola jalan tol mencatat 1.194.225 kendaraan telah masuk kembali ke wilayah ibu kota dan sekitarnya. Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas di empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama dan GT Fungsional Japek II Selatan (dari arah Bandung), GT Cikupa (dari arah Merak), dan GT Ciawi (dari arah Puncak).

Sementara moda angkutan laut pada lebaran tahun ini, sejak 16 Maret hingga 6 April, PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dengan total kapasitas angkut mencapai 60.212 kursi. Jumlah penumpang kapal laut tercatat mencapai 416.370 orang. Pada 6 April saja, tercatat 22.247 penumpang menggunakan layanan transportasi laut. Ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi ini selama musim mudik dan balik.

Sementara itu, pelabuhan keberangkatan terpadat adalah Pelabuhan Makassar dengan jumlah penumpang mencapai 42.257 orang, disusul Balikpapan, Pulau Batam, dan Ambon. Adapun rute dengan volume penumpang tertinggi adalah Pulau Batam-Belawan,

Balikpapan-Surabaya, dan Kumai-Semarang. Data ini menggarisbawahi peran strategis transportasi laut dalam mendukung mobilitas antarpulau di berbagai wilayah Indonesia.

Kepolisian juga menyampaikan, terjadi penurunan signifikan sebesar 30 persen selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, tercatat hanya 2.637 insiden kecelakaan lalu lintas selama masa mudik lebaran. Angka tersebut jauh menurun dari 3.728 kejadian pada periode yang sama tahun 2024.

Penurunan ini dianggap sebagai

hasil nyata dari strategi pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif di lapangan. Ia menyampaikan pencapaian ini merupakan hasil dari kerja tanggap yang cepat, cerdas, dan cermat dari Polri, Kementerian Perhubungan, serta stakeholder dalam pelaksanaan arus mudik lebaran.

"Arus mudik lebaran 2025 dapat dikatakan arus mudik terbaik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tingkat kecelakaan sangat minim. Salut untuk kerja-kerja tanggap yang cepat, cerdas, dan cermat dari Polri dan Kemenhub, serta seluruh stakeholder terkait," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar itu.  **um/mh**

Wakil Ketua DPR RI
Adies Kadir.



FOTO: DOK/VEL

Arus Mudik 2025 yang Terbaik

Arus mudik Lebaran 2025 berjalan lancar dan dinilai merupakan yang terbaik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ada banyak catatan positif dalam mengawal arus mudik tahun ini.



KEPOLISIAN RI mencatat, terjadi penurunan angka kecelakaan yang signifikan sebesar 30 persen selama Operasi Ketupat 2025

dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data resmi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, tercatat hanya 2.637 insiden kecelakaan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2025. Angka tersebut, jauh menurun dari 3.728 insiden pada tahun 2024.

Selama arus mudik berlangsung, DPR RI berperan mengawal persiapan arus mudik, mendorong kesiapan infrastruktur, dan menekankan pentingnya mudik ramah keluarga. Komisi VI DPR RI bahkan jauh-jauh hari sudah membahas intens kesiapan mudik 2025 ini. Satu diantaranya ialah saat Komisi VI DPR RI menggelar agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti Syukur dan Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto.

Rapat membahas kesiapan infrastruktur dalam mendukung arus mudik dan balik di momen Idulfitri 2025, Maret lalu. Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, menekankan

pentingnya pengelolaan lonjakan mobilitas publik guna mencegah kemacetan, gangguan operasional, dan risiko kecelakaan.

"Setiap tahun, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan tradisi mudik untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman. Infrastruktur jalan tol, seperti Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera, memegang peran sentral

dalam memastikan kelancaran dan keselamatan para pemudik," ujar Andre.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, data terkini menunjukkan bahwa puncak arus mudik terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara puncak arus balik berlangsung pada 5-7 April 2025. Selama periode H-10 hingga H+10 Idulfitri, diperkirakan sebanyak 6,9 juta kendaraan akan melintasi Tol Cipali dan Tangerang-Merak.

Di sisi lain, demi meringankan biaya perjalanan masyarakat, PT Jasa

Wakil Ketua Komisi VI,
Andre Rosiade.



FOTO: FARHAN/VEL

Marga menerbitkan kebijakan berupa diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk seluruh golongan kendaraan. Diskon ini berlaku selama enam hari, yaitu empat hari sebelum lebaran (24-27 Maret 2025) dan dua hari setelah lebaran (8-9 April 2025).

Diskon tarif ini berlaku di sejumlah ruas jalan tol Trans Jawa yang dikelola PT Jasa Marga, yakni Integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, serta Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Sementara itu, diskon tarif tol saat arus balik berlaku 26-28 Maret 2025 untuk pengguna jalan yang melakukan perjalanan dari GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama.

“

Inovasi dan strategi baru untuk mengurangi kemacetan. Salah satu usulannya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% yang tidak hanya diberikan pada hari-hari puncak, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya.

Alex Indra Lukman
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

Sedangkan ruas jalan tol Trans Sumatera, diskon tarif tol berlaku di Jalan Tol Indrapura – Kisaran, Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Segmen Tebing Tinggi



Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

– Sinaksak), Jalan Tol Pekanbaru – Dumai, Jalan Tol Indralaya – Prabumulih, Jalan Tol Kayuagung – Palembang, Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, dan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menekankan tanggung jawab besar yang diemban PT Jasa Marga dan PT Utama Karya untuk menjaga kelancaran perjalanan selama musim mudik tahun ini. Ia mengajak semua pihak memastikan langkah-langkah antisipatif disiapkan dengan baik demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, mengusulkan berbagai inovasi dan strategi baru untuk mengurangi kemacetan. Salah satu usulannya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% yang tidak hanya diberikan pada hari-hari puncak, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya. "Diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan, sehingga arus mudik dan

balik lebih merata," usul Herman, Maret silam.

Ia pun menekankan perlunya kesiapan infrastruktur jalan tol yang lebih baik. Herman mengapresiasi peran Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, yang berupaya meningkatkan koordinasi antar-lembaga, terutama dalam menghadapi lonjakan pemudik yang diperkirakan lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Herman turut menyoroti kesiapan fasilitas pendukung, terutama terkait bahan bakar dan layanan bengkel darurat. Oleh karena itu, ia mengingatkan PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan BBM di jalur mudik, serta meningkatkan armada pengiriman BBM dengan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan kemacetan. "Kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik," ujarnya. **we/mh**

MUDIK 2025

Pergerakan masyarakat masa Lebaran 2025

Potensi pergerakan masyarakat
(Data Kemenhub, 11 Maret 2025)
146,48 uta orang (kurang lebih 52%
dari jumlah penduduk)

Puncak arus mudik dan arus balik

- Arus mudik
(Jumat, 28 Maret 2025)
- Arus Balik
Minggu, 6 April 2025

Daerah Asal Pemudik Terbanyak



Transportasi yang digunakan

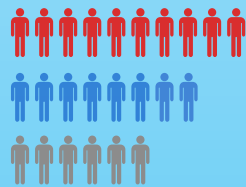
	Mobil pribadi	33,69 juta orang
	Bus	24,76 orang
	Kereta api	23,58 juta orang
	Pesawat	19,77 juta orang
	Sepeda motor	12,74 orang



Langkah antisipasi pemerintah

- Memastikan jalan nasional dan tol layak dan aman digunakan
- Mengecek kelaikan armada transportasi umum yang beroperasi
- Merancang rekayasa lalu lintas untuk mengendalikan kemacetan
- Menggelar mudik gratis untuk memfasilitasi

Jumlah pendatang ke Kota Jakarta meningkat 129% dari tahun 2024



2025

Angka Kecelakaan Mudik



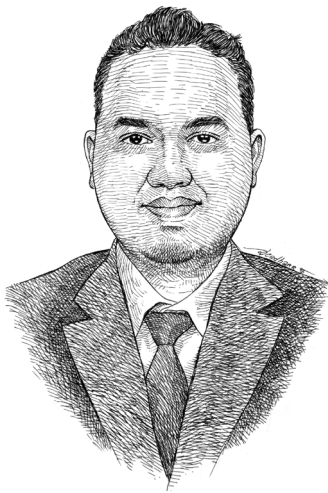
- 220 kasus kecelakaan (turun 45% dari tahun 2024)
- Meninggal 59 orang (turun 69% dari tahun 2024)

Perputaran Uang Lebaran 2025

Rp137,98 triliun (60% Jawa dan 40% luar Jawa)
Turun 12% dibanding tahun lalu

Sumber: Antara, Kompas, Good Stats





Oleh:

Ilham Pambudi

Tenaga Kependidikan
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

Paradoks Kebijakan Mudik Dalam Menjawab Kebutuhan Mobilitas Rakyat

Mudik merupakan fenomena sosial budaya yang telah melekat kuat dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi ini bukan hanya dimaknai sebagai perjalanan kembali ke kampung halaman, tetapi juga sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai kekeluargaan, spiritualitas, dan solidaritas sosial.

Dalam perspektif antropologi sosial, mudik menjadi momentum pemulihan identitas kolektif serta simbol

dari keterikatan emosional antara individu dengan akar budaya asalnya.

Setiap tahun, gelombang besar arus manusia menuju daerah asal tidak hanya menandai perputaran ekonomi dan mobilitas sosial, melainkan juga mencerminkan dinamika relasi antara negara, warga negara, dan sistem kebijakan publik yang mengaturnya.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mudik tidak lagi dapat dipandang sebagai rutinitas semata. Mudik telah menjadi indikator penting dalam membaca perubahan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada tahun 2025 tercatat sebanyak 154,6 juta orang.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 4,69% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 162 juta orang. Penurunan tersebut dapat dipahami

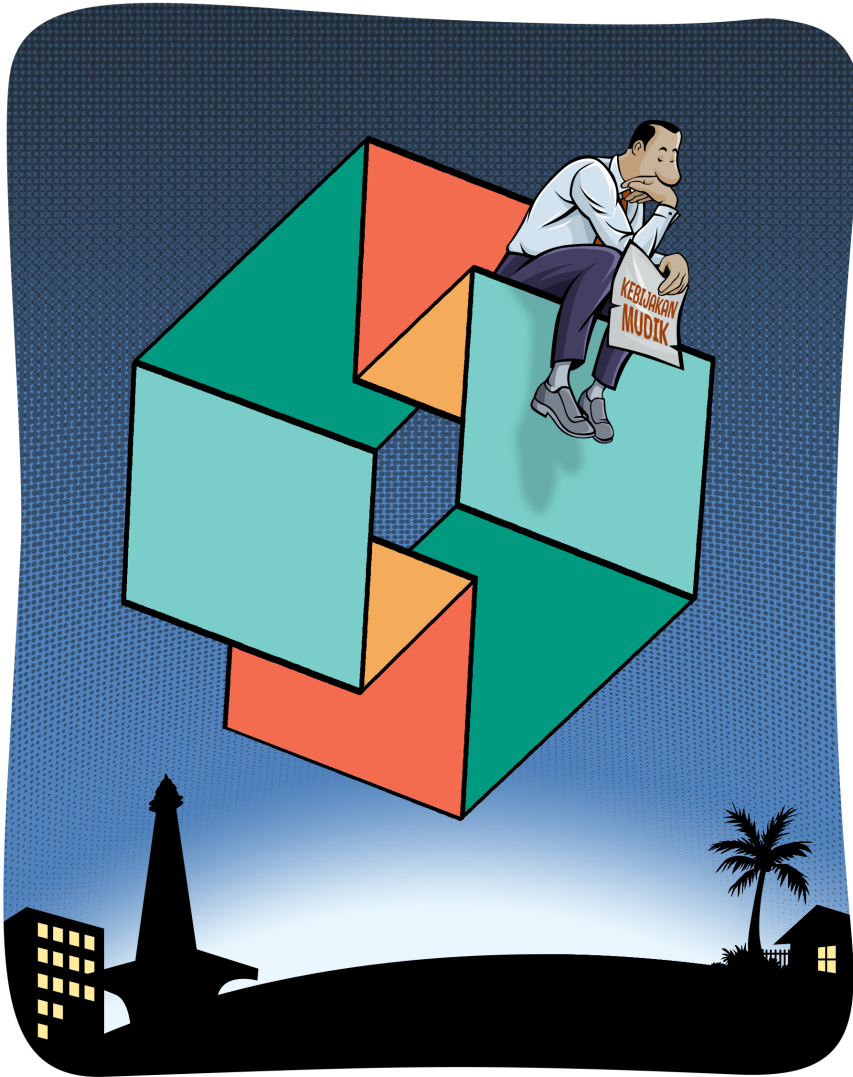
sebagai refleksi dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin rasional dalam membuat keputusan, terutama dalam kompleksitas gejolak dinamika perekonomian. Faktor-faktor seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, penurunan daya beli, serta meningkatnya biaya logistik dan transportasi menjadi determinan utama yang membentuk tren ini.

Dalam hal ini, fenomena mudik dapat dipahami sebagai cermin dari ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi nasional. Dalam menanggapi hal tersebut, berbagai kebijakan pemerintah yang tampak pro rakyat menjadi jalan pintas untuk mengantisipasi agar mudik tahun 2025 ini berjalan dengan sistematis untuk mendukung kelancaran arus mudik.

Salah satu kebijakan yang

diterapkan adalah pemberlakuan sistem Work From Anywhere bagi Aparatur Sipil Negara dan pegawai BUMN. Skema ini memberikan keleluasaan waktu kepada pegawai untuk mudik lebih awal atau kembali lebih lambat yang menjadi ironi karena harus mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dengan dalih mengurangi beban arus lalu lintas.

Selain itu, diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 13-14% diberikan sebagai insentif untuk mendorong pemudik menggunakan moda transportasi udara. Di sisi lain, program mudik gratis juga diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan melalui berbagai moda transportasi seperti bus, kapal laut, dan kereta api, namun berdasarkan data dari Kementerian



Perhubungan, jumlah peserta mudik pada program ini hanya mencakup kurang dari 0,05% dari total jumlah pemudik nasional.

Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut secara nominal hadir di tengah masyarakat, efektivitasnya belum mampu menjangkau skala kebutuhan yang sesungguhnya. Di sinilah letak paradoks kebijakan mudik tahun 2025 ini. Di satu sisi, pemerintah mencoba ingin menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan yang populis dan mudah dipahami publik. Di sisi lain, substansi dari kebijakan tersebut patut dipertanyakan, terutama terkait dengan validitas data kebutuhan masyarakat yang

digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan.

Apakah program-program tersebut benar-benar merupakan hasil dari asesmen berbasis bukti atau hanya merupakan strategi jangka pendek yang ditujukan untuk mendulang simpati publik pada disaat masyarakat sudah tidak puas dengan kinerja pemerintah? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan apabila kita melihat bagaimana program-program tersebut lebih menekankan pada aspek pencitraan daripada pembenahan sistemik terhadap tantangan transportasi dan kesenjangan ekonomi.

Dari perspektif evaluasi kebijakan publik, mudik tahun 2025

perlu dikaji secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan multidimensional, baik dari sisi konteks sosial ekonomi, input kebijakan, proses implementasi, hingga capaian akhir atau outcomenya. Evaluasi ini dapat menggunakan kerangka CIPP (Context, Input, Process, Product) atau model evaluasi rasional-instrumental yang mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan.

Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan mudik, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan seperti pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur transportasi publik di wilayah non-Jawa, serta penguatan mekanisme subsidi yang berbasis data kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan mudik yang tidak hanya responsif secara politik, tetapi juga reflektif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mudik bukan sekadar ritual tahunan yang bersifat emosional dan kultural, tetapi juga menjadi medan uji atas kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan. Ke depan, penting bagi negara untuk tidak hanya hadir dalam bentuk intervensi teknis, tetapi juga sebagai fasilitator utama dalam menjamin hak mobilitas setiap warga negara secara proporsional dan adil.

Oleh karenanya, reformulasi kebijakan mudik perlu diarahkan untuk menjawab tantangan struktural yang lebih luas, seperti distribusi pembangunan infrastruktur, penguatan sistem transportasi publik, serta jaminan sosial yang mampu menopang beban ekonomi masyarakat secara menyeluruh. 🌿

Mengawasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk bersubsidi kembali mendapat sorotan serius DPR RI, menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Peraturan ini menjadi titik tolak reformasi sektor pertanian nasional. Namun, muncul sejumlah tantangan teknis dan kebijakan yang harus segera dijawab.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Komisi IV DPR RI, yang membidangi sektor pertanian, menilai bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini diserahkan ke mekanisme pasar terbukti menyulitkan petani. Wakil

Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengusulkan pelibatan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam distribusi pupuk bersubsidi, agar akses petani menjadi lebih mudah dan efisien.

"Distribusi pupuk bersubsidi harus adil dan efisien. Ini bukan monopoli. Karena pupuk ini disubsidi oleh negara, maka negara berhak mengaturnya," tegas Alex. Ia menekankan, pengaturan distribusi pupuk bersubsidi perlu dilakukan untuk menjamin ketepatan sasaran, waktu dan harga. Terlebih, pupuk menjadi komponen vital dalam mendukung pencapaian Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

Paradigma Salah

Sementara itu, dalam forum audiensi bersama Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) Jawa Tengah, Anggota Komisi IV DPR RI Firmansyah Soebagyo menyampaikan kritik tajam terhadap paradigma kebijakan pupuk subsidi yang selama ini disamakan dengan program bantuan sosial.



Distribusi pupuk bersubsidi harus adil dan efisien. Ini bukan monopoli. Karena pupuk ini disubsidi oleh negara, maka negara berhak mengaturnya

Alex Indra Lukman
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

"Pupuk subsidi adalah alat produksi, bukan bantuan konsumtif. Maka, tidak bisa dikelola dengan pendekatan bantuan sosial," tandas Firmansyah. Ia menekankan pentingnya penggunaan data geospasial dalam menyalurkan pupuk subsidi. Menurutnya, alokasi pupuk harus

didasarkan pada luasan lahan dan kebutuhan produksi, bukan semata pada jumlah penerima.

Dalam audiensi tersebut, kekhawatiran muncul akibat ketidakjelasan peran distributor dalam skema baru distribusi. Meski Perpres menyebut distribusi akan dilakukan langsung, banyak pihak menilai penghapusan peran distributor bisa menimbulkan kendala teknis dan logistik di lapangan.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mengusulkan, pembentukan satuan tugas (Satgas) pupuk bersubsidi di tingkat pusat dan daerah. "Satgas harus punya kewenangan untuk menindak tegas distributor maupun pengecer yang menyalahgunakan pupuk subsidi. Ini agar distribusi sampai ke petani tepat waktu dan jumlah," seru Rina. Rina juga menyoroti pentingnya ketertiban administrasi, transparansi data penyaluran, dan pelibatan aktif kelompok tani (Poktan) dalam proses distribusi.

Evaluasi Menyeluruh

Tak hanya Komisi IV, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI juga mengambil langkah strategis dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama akademisi dan organisasi tani untuk menelaah efektivitas subsidi pupuk.

Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron, menekankan perlunya pemenuhan prinsip '5T' tepat sasaran, tepat harga, tepat dosis, tepat penyaluran, dan tepat waktu. "Pupuk harus menyesuaikan jadwal tanam, bukan sebaliknya," ujar Herman.

BAKN mencatat dari tahun 2018 hingga 2023, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp203,44 triliun, dengan realisasi sekitar 93,68 persen. Tahun 2025, alokasi meningkat menjadi Rp44,15 triliun dengan target 9,5 juta ton.

Wakil Ketua BAKN Habib Idrus Salim Aljufri, juga memimpin RDPU



FOTO: OJI/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.



FOTO: RINI/VEL

Wakil Ketua BAKN Habib Idrus Salim Aljufri.



FOTO: DOK/VEL

Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron.



FOTO: OJI/VEL

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah.

yang menghadirkan pakar dari BRIN, IPB, dan Unpad. Mereka menyoroti tingginya Harga Pokok Penjualan (HPP) akibat masih tingginya ketergantungan pada bahan baku impor. "HPP naik, subsidi ikut naik. Ini membebani negara. Kita ingin reformulasi agar subsidi tetap menyentuh petani tapi lebih efisien," harap Idrus.

Menanggapi tantangan distribusi langsung ke desa-desa, Anggota BAKN DPR RI Melchias Markus Mekeng, mengusulkan kerja sama

antara PT Pupuk Indonesia dengan BRI. Bank dengan jaringan nasional ini dinilai dapat menjangkau masyarakat desa dan menyediakan modal kerja bagi toko-toko atau distributor lokal.

"Petani tidak perlu ke kota, cukup ke toko terdekat. Ini bisa tekan ongkos distribusi dan mencegah kenaikan harga akibat logistik," terang Mekeng. Ia juga menyoroti pentingnya memberantas mafia pupuk yang selama ini merugikan petani dan mengacaukan rantai distribusi.

pun/mh

Saatnya Mengurangi Ketergantungan dan Diversifikasi Ekspor

Ketika dunia kembali terguncang oleh langkah proteksionis Amerika Serikat. Lonjakan bea masuk terhadap produk ekspor dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menjadi alarm serius bagi perekonomian nasional.



Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris.

Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat. Namun, di balik langkah diplomatik dan upaya negosiasi yang sedang berlangsung, suara dari Senayan menggema lebih lantang: Indonesia harus lebih berani memutus ketergantungan pada satu pasar dan membuka jalan baru menuju kemandirian ekonomi.

Dalam kunjungan kerja Komisi

XI DPR RI ke Kantor Wilayah Bea Cukai Bandung beberapa waktu lalu, Anggota Komisi XI Andi Yuliani Paris menyuarakan kegelisahan sekaligus solusi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendiversifikasi pasar ekspornya. "Komoditas kita sangat melimpah, baik hasil pertanian maupun perikanan. Pemerintah harus lebih serius menjajaki pasar

baru seperti India, Afrika, dan Timur Tengah," ujarnya.

Ia mencontohkan kebutuhan komoditas pangan untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Menurutnya, permintaan bahan pangan seperti beras, sayur, dan ikan cukup tinggi, dan bisa dipasok langsung dari Indonesia. "Selama ini, Saudi masih banyak memasok dari Thailand. Ini peluang yang terlewatkan," tegas politisi Fraksi PAN itu.

Sementara itu, di Jakarta, Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto menyoroti dampak kebijakan tarif terhadap industri padat karya seperti tekstil dan garmen. Dengan nada prihatin, ia menyebut pelaku industri di daerah pemilihannya "berdarah-darah" menghadapi beban tarif ekspor hingga 32 persen. "Di pasar lokal sudah berat, ekspor pun makin sulit. Untuk industri, beda tarif satu persen saja sudah sangat signifikan," kata Firnando.

Ia menuntut pemerintah melakukan diplomasi dagang yang konkret, termasuk mengupayakan kembalinya fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat. Firnando juga mendorong percepatan perjanjian Indonesia-EU CEPA agar Indonesia tidak tertinggal dari Vietnam dan Bangladesh yang sudah menikmati tarif preferensial dari negara-negara Barat.

Di sisi lain, tensi perang dagang Amerika dan China yang kembali memanaskan justru dibaca sebagai peluang oleh Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja. "Eskalasi tarif antara AS dan China bisa mendorong relokasi industri dari China ke negara lain. Indonesia harus siap bersaing menarik investasi," ujar politisi Fraksi Golkar itu saat kunjungan ke Serang.

Namun, Abraham mengingatkan, peluang hanya bisa diraih jika Indonesia mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat SDM, dan menjaga iklim investasi yang sehat.



Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto.



Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal.

"Vietnam, Thailand, dan Malaysia bukan lawan yang mudah. Kita harus lebih kompetitif, cepat, dan cerdas."

Ia menambahkan bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS—sebesar 18 miliar dolar AS—merupakan modal tawar yang kuat dalam diplomasi ekonomi. Tetapi pemerintah harus cermat dan fleksibel, serta memastikan investasi asing tidak

menggerus kepentingan nasional, terutama UMKM dan ekosistem lokal.

Sementara itu, dari Sidoarjo, suara pelaku industri kecil menggema lewat Anggota Komisi VII DPR RI Beniyanto. Dalam kunjungan reses Komisi VII, ia mendengar langsung keluhan IKM alas kaki yang terhimpit oleh membanjirnya produk impor murah, terutama dari China.

"Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri. Mulai dari pengawasan impor ilegal, menjaga pasokan bahan baku lokal, hingga pelatihan SDM," tegasnya. Beniyanto juga menekankan pentingnya akses pembiayaan yang mudah dan murah, agar pelaku IKM dapat bertahan dan bersaing di tengah tekanan pasar.

Di tengah semua dinamika itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan bahwa respons jangka pendek seperti negosiasi tarif harus diiringi dengan

strategi jangka panjang. "Pemerintah tidak boleh hanya reaktif. Harus ada kebijakan terukur yang melindungi perusahaan nasional dan menghindari PHK massal," katanya.

Hekal juga menyoroti perlunya pemetaan sektor industri yang paling terdampak dan pemberian insentif atau stimulus yang tepat sasaran. Dalam pandangannya, transformasi ekonomi Indonesia harus dilandaskan pada prinsip kemandirian dan keberlanjutan.

Langkah-langkah konkret pemerintah memang sudah tampak. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri tengah mengatur jadwal negosiasi dengan mitra strategis. Di sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus mendorong realisasi investasi sektor manufaktur.

Namun jalan menuju ekonomi yang tidak mudah goyah karena gejolak global memerlukan komitmen bersama—dari legislatif, eksekutif, hingga pelaku usaha. Diversifikasi pasar, penguatan industri domestik, dan diplomasi ekonomi yang tangguh menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia tidak bisa hanya berharap pada satu pintu ekspor. Saatnya membuka jendela baru ke berbagai belahan dunia. **aha/mh**

KEBIJAKAN TARIF IMPOR AS



2 April 2025

AS umumkan kebijakan tarif "Liberation Day Tariffs"

AS Menetapkan tarif dasar 10% untuk semua impor dan tarif tambahan hingga 32% untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia

9 April 2025

Tarif mulai diberlakukan Produk RI seperti elektronik, tekstil, alas kaki, dan furnitur terkena bea masuk tambahan

10-17 April 2025

Pemerintah RI Siapkan strategi diplomasi

Indonesia tidak akan membalas tarif secara sepihak, tetapi akan menempuh jalur diplomasi

18 April 2025

Airlangga mulai negosiasi di AS

RI mengusulkan peningkatan impor dari AS hingga USD 19 Miliar, termasuk energi dan produk pertanian, sebagai imbal balik penghapusan tarif.

22 April 2025

Penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA)

RI dan AS menandatangani NDA sebagai dasar untuk memulai negosiasi teknis lebih lanjut mengenai tarif

25 April 2025

Pemerintah tegaskan posisi nasional

Menko Perekonomian Airlangga menegaskan Indonesia ingin hubungan dagang yang "fair and square" dan tidak akan mengorbankan kepentingan nasional demi lobi perdagangan

Akhir April 2025

Negosiasi teknis masih berlangsung

Negosiasi memasuki tahap teknis di Washington dan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari sejak pertengahan April

RUU KUHAP

Fokus Restorative Justice dan Perlindungan HAM

Komisi III DPR RI secara resmi telah menyampaikan draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Draft tersebut telah selesai pada tahap penyusunan dan Komisi III akan membahasnya pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025. Pembahasan RUU KUHAP ditargetkan selesai dalam dua kali masa sidang.

Ketua Komisi III
Habiburokhman, dalam
konferensi pers di
Gedung Nusantara II,
Senayan, Jakarta, Kamis
(20/3/2025).



FOTO: DEVI/VEL

“ KUHAP ini menggantikan KUHAP lama yang sudah berlaku per tahun ini sekitar 44 tahun ya, karena (dari tahun) 1981 sekarang 44 tahun dan tentu kita harus menyesuaikan juga dengan KUHAP baru yang akan berlaku 1 Januari 2026,” jelas Ketua Komisi III Habiburokhman.

Beberapa hal yang digarisbawahi Habib dalam pembahasan KUHAP adalah KUHAP baru tidak akan mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Polri tetap menjadi penyidik utama, dan jaksa tetap menjadi penuntut tunggal.

“KUHAP baru mengandung banyak perbaikan, karena

menyesuaikan dengan KUHAP baru yang menganut nilai restorasi, restitusi, dan rehabilitasi,” jelasnya.



KUHAP baru tidak akan mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR RI

Salah satu fokus utama adalah pencegahan kekerasan dalam penyidikan, dengan mewajibkan pemasangan CCTV di setiap ruang pemeriksaan dan penahanan.

Selain itu, KUHAP baru memperkuat peran advokat, yang kini dapat menyampaikan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap kliennya. Advokat juga dapat mendampingi saksi dan korban, tidak hanya tersangka.

KUHAP baru juga memaksimalkan keadilan restoratif yang merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. “Yang paling

penting, KUHP baru memaksimalkan restorative justice. Kami buat satu bab khusus restorative justice. Jadi, mulai penyidikan, penuntutan, sampai persidangan, bisa dilakukan restorative justice,” ungkapnya.

Konsep restorative justice ini menekankan pada pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata menghukum pelaku, dengan melibatkan korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara. “Jadi dihukum oleh putusan pengadilan, tapi putusannya adalah perbuatan yang terbukti tetapi dimaafkan dan tidak dikenai hukuman. Itu di KUHP yang baru yang kita coba maksimalkan,” jelas piliiti Fraksi Partai Gerindra ini.

Hal lain yang juga dibahas dalam KUHP baru adalah pengaturan soal hak-hak kelompok rentan, yakni perempuan, difabel, dan lanjut usia, yang sering menghadapi kendala dalam proses hukum. Mereka akan mendapat perhatian khusus dan dilindungi hak-haknya.

Sementara itu, syarat penahanan juga diperketat untuk mencegah penahanan sewenang-wenang sebelum proses persidangan. “Kalau yang sekarang kita bikin pengaturan adanya upaya melarikan diri berarti sudah ada perbuatan permulaan untuk melarikan diri, menghilangkan alat bukti, atau mengulangi tindak pidana, tambah banyak lagi syarat. Jadi, enggak gampang sewenang-wenang orang ditahan sebelum proses persidangan,” imbuhnya.

RUU KUHP sendiri, disebutkan Habib, tidak memiliki terlalu banyak pasal, hanya kurang dari 300 pasal, berbeda dengan UU KUHP yang memiliki lebih dari 700 pasal. Ia meyakini pembahasan RUU KUHP tidak akan menimbulkan banyak perdebatan, karena fokus utamanya adalah memperkuat hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, saksi, maupun korban.

RUU KUHP yang baru diharapkan dapat menciptakan



FOTO: DEWI/VEL

Anggota Komisi III Hinc Panjaitan dalam konferensi pers saat menyampaikan draf final RUU KUHP, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).



Ini adalah komitmen Komisi III yang secara terbuka menyampaikan ke publik memaknai meaningful participation ini untuk membahas sebuah rancangan undang-undang

Hinc Panjaitan
Anggota Komisi III DPR RI

sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak. Pembahasan RUU KUHP baru tersebut diketahui juga dilakukan dengan mempertimbangkan KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026.

Untuk itu, ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam

memberikan masukan dan aspirasi terhadap penyusunan KUHP baru yang rencananya akan diselesaikan pembahasannya dalam dua kali masa sidang ke depan.

Senada dengan Habib, Anggota Komisi III Hinc Panjaitan menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan partisipasi bermakna (meaningful participation) pada pembahasan RUU KUHP. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa UU KUHP yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Ini adalah komitmen Komisi III yang secara terbuka menyampaikan ke publik memaknai meaningful participation ini untuk membahas sebuah rancangan undang-undang,” ungkapnya. Selain mempublikasikan draf RUU KUHP agar dapat diakses oleh publik, anggota Komisi III juga akan turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Komisi III akan terus membuka komunikasi terhadap masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyusunan RUU KUHP.  **bia/mh**



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine, di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025). Foto: Ist/Andri

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, saat meninjau langsung kondisi terkini pasca-banjir yang melanda Kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/4/2025). Foto: Ist/Andri





Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan Parlemen Kampus yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, sebagai bagian dari upaya DPR RI dalam mendekatkan proses legislasi kepada generasi muda di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/4/2025). Foto: Balggys dan Tonda/Andri



Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di hadapan media dalam konferensi pers, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Komisi III DPR RI telah selesai melakukan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Selanjutnya, pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 mendatang, Komisi III akan segera melakukan pembahasan RUU KUHAP. Foto : Devi/Andri



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga didampingi pimpinan dan anggota BKSAP lainnya saat menerima kunjungan dari Delegasi Ketua Komite Perdagangan Internasional (INTA) Parlemen Eropa di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025). Foto: Jaka/Andri

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron dalam agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Foto : Prima/Andri





Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Parlemen Polandia Dave Akbarshah Fikarno Laksono menerima courtesy call Parlemen Polandia di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Foto : Jaka/Andri



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Adies Kadir, menghadiri acara halalbihalal yang digelar di lingkungan DPR RI sebagai bentuk perayaan Idulfitri 1446 Hijriah di Gedung Nusantara IV, Senin (14/4/2025). Foto: Jaka/Andri



*Didik
Haryadi*

Mendedikasikan
Diri Untuk
Rakyat

Sebuah desa sederhana yang dihuni hampir 100 persen penduduknya berada di garis kemiskinan. Hampir tak ada yang memiliki kamar mandi dan toilet di setiap rumah. Hanya sekitar 15 persen saja dari penduduk desa ini yang memiliki fasilitas kamar mandi dan toilet. Sungai pun akhirnya jadi tumpuan untuk bersih-bersih dan keperluan lainnya. Akses listrik pun belum ada di desa ini. Ketika malam tiba, desa jadi sangat gelap.

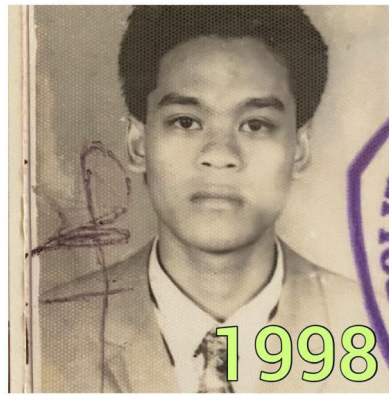
Pertanian merupakan sektor andalan yang menjadi sumber penghidupan masyarakatnya. Berada di Boyolali selatan, desa ini menghadirkan sisi lain lanskap pedesaan yang asri dan kerukunan warganya yang sejuk. Inilah desa Manggis yang berada di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Syahdan, di desa ini hidup keluarga kecil sederhana. Sepasang insan di desa tersebut sedang menanti kelahiran anak ketiganya.

Tangis bayi mungil seketika memecah kesunyian. Tahmid tiada henti terucap dari bibir seorang ibu yang baru saja menjalani persalinan. Kalender di dinding menunjukkan 12 November 1976. Kedua orangtuanya menamai bayi ini Didik Haryadi.

“

Bila ditanya, apa cita-citanya sewaktu kecil? Ia menjawab, ingin jadi dokter atau tentara. Cita-cita yang dipandang bergengsi ketika kecil.



Transformasi Didik Haryadi dari tahun 1998 - 2018.



Sepasang insan yang sedang berbahagia itu adalah Suyadi dan Supiyanti. Kelahiran Didik sekaligus membawa kebahagiaan tersendiri, karena ini adalah anak laki-laki pertamanya setelah dua kakaknya adalah perempuan. Didik adalah bungsu dari tiga bersaudara. Didik dilahirkan di tengah keprihatinan. Tidak ada listrik dan kesejahteraan keluarga pun sangat memprihatinkan.

Ayah Didik adalah pegawai bantuan di puskesmas, Boyolali. Sementara ibundanya adalah seorang pembuat sapu lantai. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, orangtuanya memelihara dua ekor sapi perah yang susunya bisa dijual. Tumbuh bersama keluarga sederhana dan religius, Didik kecil suka sekali bermain bersama sahabat-sahabat kecilnya di desa.

Mandi di sungai adalah kesenangan tersendiri bersama

para sahabatnya kala itu. Areal sawah yang hijau membentang jadi tempat bermain pula. Di sawah, ia suka memetik tomat dan mentimun. Senangnya mengingat masa kecil di desa.

Mengawali pendidikan formalnya, tahun 1982, Didik kecil bersekolah di SDN Manggis 2. Ia biasa berjalan kaki bersama para sahabat kecilnya ke sekolah. Setamat SD, ia melanjutkan ke SMPN 1 Boyolali, tahun 1988. Semasa SMP, ia sudah naik sepeda. Berangkat ke sekolah selalu bersama-sama dengan temannya. Lalu, tamat SMP, Didik melanjutkan ke SMA Bhinneka Karya, Boyolali. Saat di SMA, ia sudah naik sepeda motor ke sekolah.

Bila ditanya, apa cita-citanya sewaktu kecil? Ia menjawab, ingin jadi dokter atau tentara. Cita-cita yang dipandang bergengsi ketika kecil. Semasa sekolah dulu, ia

sangat menyukai mata pelajaran sejarah dan biologi. Didik adalah siswa berprestasi. Di sekolahnya, ia pernah menjadi juara kelas. Banyak kenangan di sekolah. Salah satu yang diingatkannya, ia suka berbagi jawaban kepada teman-temannya saat ujian.

Membangun Usaha

Setamat SMA, tahun 1994, pemuda Didik melanjutkan studi D3 ke Politeknik Industri di Bandung, jurusan mesin produksi. Mengambil jurusan ini, karena sangat suka dengan manufaktur dan industri. Tamat kuliah, tahun 1997, Didik langsung bekerja di TEAC Japan, sebagai teknisi di perusahaan elektronik ternama dari Jepang di Batam. Hanya setahun di perusahaan ini, ia kemudian bekerja di Teach Electronic Indonesia, Batam sebagai staf teknik.

Setelah sempat berkarir di beberapa perusahaan, Didik kemudian bekerja di PT. Texmaco Group pada 2001-2003 sebagai ERP (developed software maintenance planner). Namun, perusahaan terakhir ini dinyatakan bangkrut dan ia pun menganggur. Inilah titik terendah dalam hidup seorang Didik Haryadi. Ia harus menghidupi kesehariannya dengan sisa tabungan yang dimiliki.

Sempat membeli sawah, tapi ternyata tidak produktif.

Kesulitan dan kesedihan menyelimuti hidupnya. Namun, tekad untuk bangkit dari keterpurukan selalu bergelora. Seperti sedang dituntun ilahi menuju kebangkitan, Didik memulai langkahnya dengan membuka bengkel las tralis dan menyewa tempat ukuran 4x6 meter. Bermodal satu mesin diesel Dong Peng, mesin gerinda, dan mesin potong, ia mulai dari titik nol. Tiga tahun ia jalani usaha bengkel las itu dengan segala pasang surutnya. Ia hadapi apa yang harus dihadapi.

Sampai akhirnya, Didik menemukan pola bisnis, hasil belajar dari banyak temannya. Takdir positif sedang menghapiri hidupnya. Ia kemudian sampai ke titik puncak dan berhasil membangun lima perusahaan baru yang bergerak di bidang energi, otomotif, konstruksi, dan jasa komoditi. Inilah hasil kesabaran dan ketekunannya. Kini, ia sudah berada di puncak keberhasilan bisnis yang ia bangun tertatih-tatih dari titik nol.

Karir profesionalnya terus melejit. Kini, ia menjadi komisar dan owner dari beberapa perusahaan Venturindo Group, diantaranya adalah PT.Venturindo Engineering,

PT.Venturindo Sinergi dan PT. Kyodo Utama Indonesia yang bergerak di bidang assembly komponen elektronik dan komponen otomotif. Sambil berkarir sebagai profesional, Didik juga tak lupa melanjutkan kuliahnya di beberapa kampus. Tahun 2020 ia kuliah S1 ilmu hukum di Sekolah Ilmu Hukum dan tahun 2022, kuliah S1 teknik industri di Universitas Pelita Bangsa.

Panggung Politik

Pergaulannya yang sangat luas dengan kaum profesional dan politisi, mengantarnya pada keputusan untuk terjun ke panggung politik. Peraih magister ilmu hukum ini, ingin memberikan dedikasi dan



Selalu ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat di dapil dan kampung halamannya.



Didik Haryadi saat berada di tengah-tengah masyarakat di dapilnya.



Didik Haryadi saat berada di tengah-tengah masyarakat di dapilnya.

sumbangsinya untuk negara lewat aktivitas berpolitik. Ia ingin terlibat langsung merumuskan berbagai kebijakan publik yang populis. Didik pun akhirnya memilih PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya.

"PDI Perjuangan adalah partai yang menekankan selalu turun ke rakyat dan masyarakat," kilahnya, singkat. Pada pemilu 2024, Didik pun menjadi caleg dari dapil Jawa Tengah V (Boyolali, Sukoharjo, Solo, Klaten) dan terpilih dengan meraih suara 76.750. Sebelum pemilu, ia bernazar, bila terpilih menjadi anggota DPR RI, akan jalan kaki dari gedung DPR di Senayan, Jakarta ke Boyolali, Jawa Tengah.

Nazar itu sudah ia tunaikan. 1 Januari 2025, perjalanan dimulai dari halaman depan gedung MPR/DPR RI menuju kampung halamannya, Desa Manggis, Mojosongo, Boyolali yang berjarak 540 km. Perjalanan itu ia tempuh dalam 19 hari. Didik betul-betul menunaikan nazarnya berjalan kaki, karena ia sudah terpilih menjadi anggota DPR RI.

1 Oktober 2024, Didik dilantik dan menjadi bagian dari 580 anggota DPR RI. "Saat dilantik saya biasa-biasa

saja, tapi setelah bekerja selama tiga bulan, saya baru merasakan ada perasaan bangga," akunya. Mantan Wakil Ketua DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) ini, selalu ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat di dapil dan kampung halamannya. Usai dilantik, Didik lalu ditempatkan di Komisi XI DPR RI yang membidangi perbankan dan keuangan.

Menyukai Lagu Rock

Sejak menjadi wakil rakyat, kesibukannya kian meningkat. Waktu kebersamaannya dengan keluarga pun berkurang. Di tengah keluarga, Didik tetaplah suami dan ayah yang bersahaja. Di rumahnya ada Jaswati, istri tercinta yang dinikahinya tahun 2000. Dari pernikahannya itu, dikaruniai tiga anak, masing-masing Fajreina rose Kania Gusti, Hyang Azzam Fawwaz as Sahid, dan Hyang Eizzan as Sidqi.

Jaswati adalah wanita asli Boyolali yang kini berprofesi sebagai komisariss sebuah perusahaan. Bila ada waktu bersama keluarga, Didik kerap mengajak wisata ke luar negeri

untuk menambah wawasan anggota keluarganya.

Anggota Ikatan Saudagar Muslim Indonesia itu, kini punya hobi golf, renang, dan lari. Bila ditanya soal makanan favorit, ia menyukai mie ayam, bakso, dan sayur urapan. Untuk urusan musik, mantan anggota Gapensi Kota Bekasi itu, lebih menyukai lagu-lagu rock dari Power Metal atau White Lion. Ia juga mengaku, menyukai penyanyi asal Malaysia Ziana Zain.

Begitulah kisah singkat Didik Haryadi hingga menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Kiprahnya di panggung politik, memang tergolong baru. Namun, kontribusinya bagi partai dan masyarakat yang diwakilinya sangat nyata. Tidak



Bersama keluarga tercinta.

saja materi. Didik juga ingin menyumbangkan pengetahuan dan dedikasinya bagi negeri tercinta.

ssh/mh

Memperjelas Revisi UU TNI

Awal Maret lalu, Komisi I DPR RI sedang sibuk merevisi sekaligus menjelaskan kepada publik soal revisi UU TNI. Revisi ini terus dimatangkan dengan menjangring sebanyak mungkin aspirasi dan pandangan publik.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, mengungkapkan bahwa saat ini

Komisi I tengah menjangring aspirasi masyarakat terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Menurutnya, revisi ini bertujuan memperkuat TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.

"Saat ini, sedang dalam tahap menjangring aspirasi masyarakat. Tentu, revisi UU TNI ini harus menjadi undang-undang yang kuat, memperkuat TNI sebagai lembaga yang berkewajiban menjaga kedaulatan negara paling depan. Itu saya kira isu pentingnya," ujar Heryawan kepada Parlemenaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (6/3/2025) lalu.

Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Aher ini menegaskan bahwa dalam proses ini, DPR RI menampung berbagai isu dan pendapat masyarakat, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM)



FOTO: ANIL/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, saat memimpin Kunspek Komisi I DPR RI ke Kota Medan.

“

Kebijakan usia pensiun bagi personel TNI perlu disesuaikan dengan standar usia pensiun di berbagai profesi lainnya

Ahmad Heryawan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

dan organisasi sipil lainnya. Masukan-masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi I DPR RI dalam pembahasan revisi UU TNI. "Oleh karena itulah, kita tampung beragam isu, beragam pendapat yang berada di masyarakat Indonesia, melalui lembaga-lembaga, melalui LSM, melalui lembaga civil society terkait," kata Aher.

Salah satu pembahasan yang turut menjadi sorotan dalam revisi undang-undang ini adalah penyesuaian batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Politisi Partai Keadilan



Anggota Komisi I DPR RI, Machfud Arifin, saat mengikuti Kunspek Komisi I DPR RI ke Kota Medan.

Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa kebijakan usia pensiun bagi personel TNI perlu disesuaikan dengan standar usia pensiun di berbagai profesi lainnya, salah satunya pegawai negeri sipil.

"Tentu kalau usia, sangatlah wajar menyesuaikan negosiasi usia pegawai negara yang lain. Sama-sama tugas negara. Kalau di sipil saja, bisa di angka 60 tahun, atau bahkan 65 tahun. Bahkan, kalau profesi mencapai 70 tahun. Jadi, TNI saya kira harus ada penyesuaian. Minimal, penyesuaian dengan angka rata-rata, di usia 58 atau 60 tahun. Saya kira sebagaimana di lembaga-lembaga lainnya, itu wajar untuk usia TNI," bebernya.

Sementara Anggota Komisi I Machfud Arifin di tempat yang sama menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI belum final dan masih dalam tahap diskusi, katanya Maret silam. "Yang kita perlu antisipasi

“Ada pembatasan seperti di undang-undang sebelumnya. Mau ditambahkan, silakan boleh saja. Tetapi tergantung nantinya dalam putusan

Machfud Arifin
Anggota Komisi I DPR RI

adalah substansi yang lain yang menjadi sorotan masyarakat luas, yaitu tidak terlalu masuk pada semua lini kegiatan civil society," ujar Machfud.

Legislator dapil Kalimantan Selatan ini mengatakan bahwa revisi terhadap undang-undang ini harus tetap mempertimbangkan

keseimbangan antara peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan batasan dalam ranah sipil. Masyarakat luas juga diharapkan berpartisipasi dalam memberi masukan terhadap revisi RUU tersebut. "Ada pembatasan seperti di undang-undang sebelumnya. Mau ditambahkan, silakan boleh saja. Tetapi tergantung nantinya dalam putusan," tambahnya.

Dengan demikian, politisi Partai NasDem ini, berharap agar DPR dapat menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, sebelum mengesahkan RUU tersebut. Sehingga, keputusan akhir akan sangat bergantung pada hasil pembahasan yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dan prinsip demokrasi. "Hal ini masih dalam pembahasan. Itu belum final. Tetapi kita juga harus mendengar aspirasi dari masyarakat secara luas," tutupnya. aas/mh

TKD Harus Memberi Manfaat Bagi Masyarakat

"Kami dari Komisi II DPR RI mengawasi langsung TKD yang ada di Kabupaten Bekasi. Kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kesejahteraan terhadap rakyat," katanya kepada Parlementaria di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025) lalu.

Semua alokasi anggaran ke daerah harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Ada banyak pos anggaran ke daerah yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk membangun dan menyejahterakan daerah dan masyarakatnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, dana Transfer ke

Daerah (TKD) khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus betul-betul terukur dan bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kesejahteraan itu sederhana, yaitu rakyat selalu meningkat pendapatannya dan pengeluarannya menurun. Jangan sampai terbalik.**”**

Aria Bima
Wakil Ketua Komisi II DPR RI



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, saat memimpin pertemuan kunres Komisi II DPR RI di Cikarang Pusat.

Ia melanjutkan, TKD ini harus berdampak langsung kepada rakyat. Sehingga, dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Bekasi harus meningkat pendapatannya, bukan pengeluarannya. "Kesejahteraan itu sederhana, yaitu rakyat selalu meningkat pendapatannya dan pengeluarannya menurun. Jangan sampai terbalik, kalau yang naik pengeluarannya bukan pendapatannya rakyat bisa mati," ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Diharapkan, dana yang berasal dari APBN TA 2025 ini pemakaiannya berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan pembangunan daerah, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. "Bupati dan Wakil Bupati ini baru menjabat satu bulan lima hari, sehingga ini menjadi langkah awal yang penting dalam implementasi kebijakan tersebut dan menimbulkan multiplier effect," pungkasnya.

Sementara di Karawang, Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengapresiasi pemerintah Kabupaten Karawang yang mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto mewujudkan ketahanan pangan nasional. "Tadi kita dengar sendiri Pak Bupati punya komitmen yang kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan. Beliau berkomitmen agar alih fungsi lahan dari sawah ke kawasan perumahan atau yang lain beliau mulai batasi," ujarnya. di Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025) silam.

Diketahui Kabupaten Karawang adalah salah satu lumbung padi nasional. Data dari BPS, produksi padi di kabupaten tersebut selalu tembus di atas 1 juta ton sejak tahun 2023. Padahal di sisi lain, pembangunan pabrik industri sangat masif di sana. Bahtra kemudian meminta komitmen berbagai pihak terkait untuk mewujudkan ketahanan pangan, termasuk Kementerian ATR/BPN. Peran kementerian itu menurutnya



FOTO: NADHEN/WEL

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong (kiri), saat bertukar cenderamata dalam kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang.



Kabupaten Karawang adalah salah satu lumbung padi nasional. Data dari BPS, produksi padi di kabupaten tersebut selalu tembus di atas 1 juta ton

Bahtra Banong
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

sangat vital dalam menjaga lajur alih fungsi lahan pertanian di kawasan

industri seperti Kabupaten Karawang.

"Yang namanya daerah industri tidak bisa dihindari, kemajuan pasti terjadi, jumlah penduduk makin banyak. Maka, hal terbesar yang dihadapi adalah bagaimana mencegah alih fungsi lahan tadi, dan perlu kerja sama semua pihak," lanjutnya.

Sebagai informasi, Presiden RI punya janji politik untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Berbagai upaya tengah dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. Bahtra pun berpesan ke Bupati Karawang, Aep Syaepuloh agar ikut ambil peran untuk mewujudkannya. **cas,ndn/mh**



FOTO: YASMIN/VEL

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi III DPR di Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).

Memantau Keterbatasan Fasilitas Penegak Hukum

Keterbatasan fasilitas bagi para penegak hukum di daerah menjadi sorotan Komisi III DPR RI. di Kalimantan Tengah (Kalteng), daerah dengan sungai dan lautan luas ini, belum memiliki kelengkapan fasilitas transportasi memadai untuk mengawasi area hukumnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, di Palangka Raya, Kamis (10/4/2025) lalu, memimpin kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalteng. Dalam pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi, Kapolda Kalteng,

terungkap ada banyak kendala infrastruktur penunjang tugas aparat di lapangan.

"Ini kunjungan kerja reses, kami datang untuk menyerap aspirasi dari Polda, Kejati, dan BNNP Kalteng," ujar Habiburokhman. Salah satu isu krusial adalah keterbatasan

fasilitas operasional yang sangat berdampak terhadap efektivitas kerja. Ia menyoroti belum tersedianya helikopter dinas yang sangat dibutuhkan dalam mendukung mobilitas aparat penegak hukum, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran hutan yang kerap terjadi di Kalteng.

"Bayangkan kalau ada kebakaran hutan, bagaimana Kapolda bisa segera turun ke lapangan jika tidak ada helikopter? Ini harus menjadi perhatian serius," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra itu. Kunjungan ini dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum daerah.

Dalam kesempatan itu, ia juga

mengapresiasi komitmen dan profesionalisme aparat penegak hukum di Kalteng. Salah satu yang disorot sebagai capaian positif adalah keberhasilan kepolisian mengungkap kasus pembunuhan yang sempat viral dan meresahkan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat dalam menangani kasus-kasus besar. Ini bukti kerja serius dan profesional," tandasnya.

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan dukungan sarana dan prasarana penegakan hukum, demi

"Ya memang disampaikan di awal, ketiganya, baik Polda, Kejaksaan, maupun BNPP, terkena efisiensi anggaran. Padahal, mereka sudah merencanakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebaik-baiknya," ujar Rikwanto di Palangka Raya, Kalteng, Kamis (10/4/2025) lalu.

Rikwanto menyebut, Komisi III akan menampung masukan tersebut dan menyampaikan aspirasi agar alokasi anggaran tahun depan bisa melebihi pagu yang ada saat ini,

sendiri. Karena wilayahnya itu 1,5 kali luas Pulau Jawa, dan beberapa lokasi bisa berjarak hingga 350-400 km. Perjalanan darat bisa makan waktu sampai 10 jam karena kondisi jalan yang kurang baik," jelasnya.

Menurut Rikwanto, keberadaan helikopter sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, mempercepat mobilisasi, serta penanganan bencana alam dan pengiriman logistik, khususnya saat musim kemarau yang kerap disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).



FOTO: YASMIN/VEL

Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (10/4/2025).

terwujudnya sistem hukum yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto, menyoroti pemotongan anggaran yang dialami oleh Polda, Kejaksaan, dan BNN Provinsi (BNPP), meskipun ketiga institusi tersebut telah menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tugas yang optimal..

demi mendukung program-program strategis di lapangan.

Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait belanja modal, termasuk pembangunan dan rehabilitasi polsek serta polres yang saat ini masih tertunda. Salah satu perhatian khusus adalah permintaan dari Polda Kalteng untuk mendapatkan helikopter operasional.

"Polda Kalteng minta helikopter

"Karena memang ada masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar, itu efeknya begini. Jadi, helikopter khusus untuk Polda Kalteng itu sangat diperlukan," ungkapnya. Sebagai mitra kerja Polri, Komisi III DPR RI akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Kapolri agar helikopter dapat segera dialokasikan untuk operasional di Polda Kalteng. ysm/mh

Melihat Pulau Weh, Habitat Migrasi Burung

Kunjungan Komisi IV DPR RI kali ini terasa berbeda. Ujung barat Indonesia jadi daerah yang dikunjungi. Kota Sabang, Aceh Darussalam, menyimpan keindahan ekosistem dan habitat burung. Pulau Weh, yang berada di Sabang, ternyata menjadi habitat burung-burung yang bermigrasi dari wilayah utara bumi.

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh adalah titik kunjungan Komisi IV yang ingin melihat dari dekat bagaimana

burung-burung dari belahan utara singgah di tempat tersebut. Ketika musim dingin tiba di belahan utara, burung-burung bermigrasi ke TWA Pulau Weh. Indonesia yang berada di

persimpangan bumi bagian selatan dan utara pun menjadi salah satu pilihan rute migrasi tersebut.

"Ternyata di sini menjadi tempat singgah migrasi burung-burung ya. Biasanya kita lihatnya cuma di National Geographic aja. Ternyata dia mampirnya di negeri kita," jelas Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi kepada Parlemen usai memimpin pertemuan Tim Kunker Reses

“ peristiwa migrasi burung-burung ini perlu dipromosikan dengan baik, karena menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Siti Hediati Hariyadi
Ketua Komisi IV DPR RI



FOTO: HANUN/VEL

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi bersama tim saat Kunker Reses Komisi IV DPR RI di TWA Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh, Rabu, (9/04/2025).

Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan RI beserta di TWA Pulau Weh, Sabang, Provinsi Aceh, Rabu, (9/04/2025) lalu.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun berkomentar, peristiwa migrasi burung-burung ini perlu dipromosikan dengan baik, karena menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. "Ini, kan, fenomena langka ya. Itu harus dipromosikan, kapan dia mampirnya, itu kan rutin. Nah, pada saat itulah dipromosikan supaya semakin banyak wisatawan yang bisa datang berkunjung ke sini," harap Titiek Soeharto, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Antoni yang turut mendampingi delegasi Komisi IV ini menyampaikan, "Ini tempat yang ikonik. Bukan hanya ikonik buat Aceh saja, tapi ikonik buat negeri ini. Sangat penting bagi negeri ini secara historis." Setidaknya ada 33 jenis burung yang rutin bermigrasi ke wilayah pesisir timur, Aceh Utara. Salah satu di antara spesies burung yang singgah di Kilometer Titik Nol itu, burung paruh sendok (spoonbills) yang kini hanya tersisa 500 ekor di dunia.

Pembangunan Sentra Kelautan

Anggota Komisi IV DPR RI Teuku Abdul Khalid menyoroti soal pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee. Ia berharap, pembangunannya segera rampung pada November 2025 ini. Menurutnya, pelabuhan tersebut telah ditunggu-tunggu oleh para nelayan karena sangat bermanfaat bagi mereka.

"Kenapa kita bangun? Karena nelayan butuh. Tadi disampaikan bahwa November ini akan selesai, dan kita (Komisi IV DPR RI) pertegas lagi bahwa November ini harus benar-benar selesai. Tidak boleh dimainkan itu," tegasnya kepada Parlemen usai melakukan tinjauan pembangunan kawasan



Komisi IV DPR RI Teuku Abdul Khalid saat melakukan tinjauan pembangunan kawasan SKPT Le Meulee, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Rabu, (9/04/2025).

FOTO: HANUM/VEL

SKPT Le Meulee, di Sabang, Aceh, Rabu, (9/04/2025) lalu.

Sebagai informasi, SKPT Sabang dibangun atas kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jepang melalui dana hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp65,4 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas utama seperti dermaga, breakwater, jalan kawasan, kantor operasional, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Memang target pelaksanaannya itu dari tahun 2017 tapi anggarannya tersendat-sendat. Karena itu, kita turun, melihat langsung, bagaimana progres pembangunannya. Ternyata setelah kita lihat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

mengatakan bahwa ada keterlambatan, karena faktor material," ungkap politisi daerah pemilihan Aceh itu.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) ini mengatakan, persoalan material yang dibutuhkan tidak tersedia di Kota Sabang dan itu mengharuskan pengiriman dari Banda Aceh. Komisi IV DPR terus mendorong Pemerintah Provinsi Aceh, agar pembangunannya selesai tepat waktu, November 2025.

"Semua nelayan menunggu. Kita pun menunggu. Harapan kita semua, ingin pembangunan ini bisa benar-benar selesai. Sehingga, kapal-kapal nelayan bisa merapat dengan mudah, tidak harus menunggu air pasang untuk berangkat dan pulang," harap Khalid.  hnm/mh



FOTO: AGUNG/VEL

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, bersama tim meninjau langsung progres pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III Tahap IV di Sulawesi Utara.

Pembangunan MORR Manado Diharapkan Mampu Urai Kemacetan

Pembangunan Manado Outer Ring Road (MORR) III tahap IV di Sulawesi Utara diharapkan segera rampung untuk mengurai kemacetan di pusat kota Manado. Proyek infrastruktur ini termasuk proyek strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras memimpin langsung

kunjungan delegasi Komisi V ke Manado. Hadir mendampingi kunjungan ini Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling dan perwakilan Balai Pelaksana Jalan

Nasional (BPJN) Sulut. Proyek MORR III Tahap IV merupakan lanjutan pembangunan jalan sepanjang 2,6 km dan dua jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp94 miliar.

Andi Iwan menyatakan, kunjungan ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara. "Kami datang mengunjungi proyek ini sebagai upaya percepatan pembangunan di provinsi ini, agar dapat segera diselesaikan," serunya. Proyek MORR III memiliki panjang 11,3 km dan sudah melewati tiga tahap pembangunan.

Tahap IV ini merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya dan diharapkan mampu menghubungkan kawasan Kalasey hingga Winangun. Kendaraan dari arah Amurang, Minahasa Selatan, yang akan menuju Minahasa Utara atau Bitung tidak perlu lagi melewati pusat kota Manado.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait pembebasan lahan. Hingga saat ini, dari total panjang MORR III, baru sekitar 4,9 km lahan yang berhasil dibebaskan. Sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa semua hambatan, baik teknis maupun non-teknis, dapat segera diatasi," katanya. Proyek MORR III Tahap

IV ini, diharapkan rampung tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya untuk peningkatan konektivitas dan pengurangan kemacetan di Kota Manado.

Masalah Banjir di Jambi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, memimpin kunjungan kerja Komisi V ke Jambi. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan temuannya terhadap persoalan ganti rugi lahan atas kolam retensi di Sungai Asam, Kota Jambi yang belum selesai. Sehingga, hal ini menyebabkan banjir di kota tersebut saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"Pada kunjungan reses kami kali ini, ditemukan persoalan ganti rugi lahan yang belum tuntas, kemudian kolam retensi yang belum selesai, sehingga menyebabkan banjir," ungkapnyanya kepada Parlemenaria usai memimpin tinjauan lapangan ke Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi, Senin (14/4/2025) lalu.

Diketahui persoalan tersebut disebabkan kebutuhan jumlah anggaran pembebasan lahan yang mencapai Rp75 miliar. Ridwan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan sisa kebutuhan anggaran untuk dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Kita sadar bahwa (APBD) kabupaten/provinsi juga terbatas keuangannya, sadar pula kita sekarang lagi ada upaya penghematan, tetapi asas prioritas menjadi utama, karena kita yakin kalau tanpa prioritas itu tidak akan terlaksana pembangunan kita," ungkap Ridwan.

Ia juga optimis akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kota Jambi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Prabowo kita percaya sebagai presiden. Dia akan memperhatikan mana yang prioritas mana yang tidak. Jambi, menurut Komisi V, sangat prioritas untuk segera diperjuangkan," pungkask politisi Fraksi Partai Golkar ini.

aha,rr/mh



FOTO: RIZKI/VEL

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR ke Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi, Senin (14/4/2025).

Menyoal Produk Teh dan Koperasi

Produksi kopi nasional sudah jauh melejit meninggalkan produksi teh nasional. Selain faktor *life style*, minum teh belum se-elitis minum kopi. Padahal, produk teh nasional begitu banyak macamnya. Saatnya teh juga bisa menjadi juara.



Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini, saat memimpin pertemuan dengan otoritas BUMN sektor perkebunan dan kehutanan di Surabaya, Kamis (10/4/2025).

Demikian disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat ditemui Parlemenaria usai memimpin pertemuan dengan otoritas BUMN sektor perkebunan dan kehutanan. Hasil perkebunan yang dikelola PTPN harusnya menjadi juara. Ada banyak komoditas yang dikelola PTPN, seperti kopi, tebu, karet, dan teh.

Erma membandingkan produksi

kopi dan teh. Kopi, katanya, sudah oke. Tapi, teh tak sebagus produksi kopi. "Saya pencinta teh. Harusnya bisa jadi idola. Teh Indonesia tidak kalah dengan luar negeri. Maka harus dikelola secara profesional, agar lebih mendunia," ucapnya usai pertemuan di Surabaya, Kamis (10/4/2025).

Dulu, lanjut politisi PKB ini, produksi teh pernah menjadi juara mengalahkan kopi. Namun, sekarang kondisinya terbalik. Ini jadi pertanyaan

serius. Revitalisasi jadi keniscayaan untuk dilakukan dari A sampai Z pada produksi teh.

"Kopi sekarang sudah jadi life style. Jadi, enggak minum kopi itu kayanya aneh. Teh juga dulu begitu. Jadi, ini kaya lagi bergantian. Tantangan pelaku usaha teh harus cari strategi terobosan supaya jadi idola lagi," seru Erma yang mengaku menyukai teh Indonesia daripada luar negeri.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, delegasi Komisi VI dipimpin wakil ketuanya Nurdin Halid menyoroti perkembangan koperasi di wilayah Sulsel. Menurutnya, koperasi yang aktif di tingkat desa perlu terus dibina, baik koperasi unit desa (KUD), koperasi nelayan, maupun koperasi

“

Kopi sekarang sudah jadi life style. Jadi, enggak minum kopi itu kayanya aneh. Teh juga dulu begitu. Jadi, ini kaya lagi bergantian. Tantangan pelaku usaha teh harus cari strategi terobosan supaya jadi idola lagi,

Anggia Erma Rini
Ketua Komisi VI DPR RI

pertanian, agar terus berdaya dan berkembang.

"Dengan semangat luar biasa, Presiden RI Prabowo Subianto mengembangkan koperasi sebagai pelaku ekonomi Pancasila, ekonomi konstitusi, dan dalam rangka



FOTO: HIRAN/VEL

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI H.A.M. Nurdin Halid saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Rabu (9/4/2025).

menyuksekan Asta Cita," ujarnya kepada Parlemenaria saat memimpin kunjungan kerja Komisi VI DPR RI

“

Koperasi tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat, pelaksanaannya tetap harus belajar dari pengalaman masa lalu

H. A. M. Nurdin Halid
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Makassar, Rabu (9/4/2025) lalu.

Nurdin menyoroti rencana peluncuran Koperasi Merah Putih oleh pemerintah pada Juli mendatang. Ia menilai, meski koperasi tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat, pelaksanaannya tetap harus belajar dari pengalaman masa lalu, khususnya praktik koperasi di era Orde Baru.

"Dulu KUD punya prestasi dalam mewujudkan swasembada beras dan menggerakkan ekonomi rakyat, tapi kemudian tidak dikelola secara profesional. Nah, ini jangan sampai terulang," tegasnya.

Selain itu, Nurdin menanggapi instruksi Menteri Koperasi yang menunjuk kepala desa sebagai pengawas koperasi. Ia berpendapat, sebaiknya kepala desa cukup

menjadi tokoh panutan masyarakat, bukan terlibat secara struktural dalam kepengurusan koperasi.

"Katakanlah cukup menjadi penasihat, tidak perlu secara struktural. Biarkan rakyat sendiri yang menentukan siapa ketuanya dan siapa pengawasnya," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurutnya, koperasi harus terbentuk atas dasar kesadaran, kemauan, dan kepentingan bersama masyarakat desa. Pemerintah cukup memberikan dukungan berupa alokasi ekonomi, fasilitas, serta kemudahan pembiayaan agar roda ekonomi bisa bergerak. "Dengan begitu, cita-cita Pak Prabowo untuk menguatkan ekonomi rakyat berbasis koperasi bisa tercapai," pungkasnya.

mh,hal/mh

Melihat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Banten dan Lombok

Komisi VII DPR RI secara khusus menyorot sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Banten dan NTB. Perlu sinergi kebijakan, inovasi, dan promosi pada dua sektor ini.

Di Banten, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti lokasi strategis provinsi tersebut yang dekat

dengan Jakarta dan memiliki Bandara Internasional Soekarno-Hatta. "Potensi Banten ini luar biasa. Bayangkan saja, bandara internasional kita, Soekarno-Hatta, berada di Banten, dan provinsi

ini sangat dekat dengan Jakarta," ujarnya di Cilegon, Banten, Rabu (26/3/2025) lalu.

Namun, ia menilai optimalisasi potensi pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif masih perlu ditingkatkan. Evita menyoroti kendala infrastruktur, minimnya promosi, dan rendahnya tingkat okupansi hotel akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. "Infrastruktur menuju daerah wisata belum optimal, seperti ke Ujung Kulon. Hal ini membuat wisatawan enggan berkunjung," jelasnya.

Ia menekankan perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga mitra untuk mempromosikan potensi Banten secara lebih efektif. Evita juga mengkritisi kurangnya koordinasi dalam kunjungan tersebut, karena tidak dihadiri oleh gubernur.

"Ini juga menjadi introspeksi bagi kami. Ke depan, kami berharap koordinasi lebih baik agar kunjungan



FOTO: SSB/VEL

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama Tim Kunres Komisi VII DPR RI saat kunjungan kerja reses ke PT Krakatau Steel di Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025).



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (26/3/2025).

ini bisa memberi dampak maksimal," katanya.

Sementara itu, Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyoroti modal dasar pariwisata Banten yang luar biasa. Namun, mengingatkan bahwa promosi dan konsep destinasi wisata perlu diperbarui.

"Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat bisa berlipat ganda, bahkan lima kali lipat dibanding sektor lain seperti pertanian," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan wisata desa. "Ada gap yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengembangkan wisata desa masih rendah. Padahal, potensi itu ada. PR kita adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar lebih percaya diri menjadi penggerak wisata," jelasnya.

Chusnunia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kemampuan pengelola wisata, peningkatan kualitas UMKM, dan optimalisasi ekonomi kreatif. "Produksi UMKM di Banten sebenarnya cukup banyak, tapi *packaging* dan pemasarannya masih kurang. Ini PR yang perlu kita dorong," tuturnya.

“
Perlu strategi
promosi yang lebih
agresif dan dukungan
dana yang memadai
untuk meningkatkan
citra Lombok di mata
dunia

Evita Nursanty
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Ia menekankan bahwa pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif saling

terhubung dalam satu ekosistem ekonomi, dan meminta kementerian terkait untuk memperkuat pendampingan serta mendorong alokasi anggaran yang lebih konkret.

Sementara ketika berkunjung ke Lombok, Evita Nursanty kembali menegaskan bahwa potensi pariwisata yang luar biasa masih belum dimanfaatkan secara optimal. "Potensi Lombok sangat luar biasa, tetapi kalau kita tidak mampu melakukan promosi, dunia tidak akan tahu," paparnya.

Ia menyerukan, perlu strategi promosi yang lebih agresif dan dukungan dana yang memadai untuk meningkatkan citra Lombok di mata dunia. Evita mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok masih jauh lebih rendah dibandingkan Bali.

"Saat ini wisatawan yang datang ke Lombok masih sangat kecil dibandingkan dengan Bali. Dari 3,2 juta wisatawan, hanya 400 ribu yang berasal dari luar negeri," ungkapnya. Ia menekankan pentingnya promosi yang masif dan dukungan anggaran yang memadai untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara.

"Jika kita sudah dikenal secara global, berarti promosi harus lebih digalakkan. Ini yang menjadi tuntutan para pelaku industri dan asosiasi, terutama dalam hal pendanaan," tutupnya. aar,ssb/mh



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, dalam foto bersama dengan tim saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (27/2/2025).

Mengatasi Persoalan Sosial dengan Kebijakan Terintegrasi

Komisi VIII DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di Indonesia melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Persoalan sosial itu mulai dari kebencanaan, peningkatan SDM, sampai optimalisasi zakat.



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, saat mengikuti kunjungan kerja reses di Bandung, Jawa Barat, Kamis, (27/03/2025).

Dalam kunjungannya ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/03/2025) lalu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan perlu regulasi kebencanaan yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurutnya, keterbatasan APBD dalam menangani bencana memerlukan perencanaan yang

matang dan prioritas anggaran yang jelas.

"Selama tidak ada klausul tentang kebencanaan dalam RPJPD atau RPJMD, maka APBD provinsi atau kabupaten/kota akan terbatas dalam menganggarkan penanganannya," ujar Selly kepada Parlemenaria di Bandung, Jawa Barat, Kamis (27/03/2025) lalu.

Selly juga menyoroti perlunya perubahan dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui revisi PP No.21. Ia berpendapat bahwa

BTT seharusnya dapat digunakan tidak hanya saat darurat bencana, tetapi juga untuk langkah antisipasi dan pencegahan.

Menyikapi banjir tahunan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Selly menyarankan relokasi warga yang tinggal di tanah negara dengan memberikan biaya kerohiman sebagai ganti rugi bangunan. Langkah ini, menurutnya, memerlukan payung hukum yang jelas agar dapat dianggarkan secara sistematis.

Sekolah Rakyat

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Rabu (26/3/2025) silam, Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti potensi program Sekolah Rakyat (SR) dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Ia menilai inisiatif Presiden Prabowo Subianto ini sebagai langkah tepat, mengingat penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berbasis bantuan langsung yang dinilai kurang signifikan.

"Program Sekolah Rakyat yang diserahkan ke Kementerian Sosial ini luar biasa, karena menyentuh akar masalah, yaitu kualitas SDM," kata Fikri. Meski optimistis, Fikri menyoroti tantangan koordinasi antarlembaga, pendanaan, dan regulasi yang menghambat efektivitas anggaran pendidikan, seperti PP No.18/2022. Ia menekankan perlunya alokasi anggaran yang tepat untuk menyukseskan program SR yang ditargetkan terealisasi pada Juni mendatang.

"Kalau tentang mengentaskan kemiskinan karena dasarnya adalah di



Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Yogyakarta, Rabu (26/3/2025).

SDM, ini saya kira diskusinya banyak sekali positif dan sangat mendukung, dan juga optimis. Nah, sekarang ini masalahnya koordinasi tiga hal, misalnya tentang pendanaan, tentang kewenangan, dan juga tentang

orientasi pendidikan. Saya kira ini yang menjadi PR kita bersama karena waktunya sangat singkat, mengingat bulan Juni nanti sudah harus direalisasikan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 ini.

Penguatan Zakat

Dalam isu penguatan zakat, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menyayangkan rendahnya pengumpulan zakat oleh Baznas Sumatera Utara dibandingkan di Jawa. Dalam kunjungannya ke Medan, Kamis (27/03/2025) silam, Ansory meminta Baznas Sumut lebih inovatif dan aktif dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk berzakat, mengingat potensi muzaki yang besar di daerah tersebut.

"Baznas Sumatera Utara harus aktif bergerak dan inovatif, jangan hanya mengandalkan pemerintah daerah," tegas Ansory. Ia mendorong Baznas Sumut belajar dari praktik terbaik provinsi lain dalam pengelolaan zakat, agar dapat meningkatkan penghimpunan dan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak, sehingga berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan.

ndy,mf,azk/mh



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar, saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/03/2025).

Meningkatkan Layanan Kesehatan di Wilayah Perbatasan

Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan di wilayah Sumatera, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kualitas layanan tentu jadi sorotan ketika melihat akses kesehatan bagi masyarakat



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (16/4).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengungkapkan hal ini saat memimpin kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Selasa

(16/4) lalu. "Tentu ini menjadi koreksi bersama. Saya kira bukan cuma Sumatera Utara, tapi juga di wilayah lain di Sumatera yang secara geografis berdekatan dengan negara tetangga. Memang ada pelayanan yang perlu kita tingkatkan,"

ujarnya kepada Parlementaria usai pertemuan.

Ia menekankan, perlu sinergi lintas sektor untuk meningkatkan fasilitas serta kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan, agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Ini menjadi koreksi untuk kita sendiri di jajaran Kementerian Kesehatan untuk memperbaiki. Termasuk menjadi motivasi semua leading sektor yang ada di bidang kesehatan. Fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," seru Putih.

Politisi Partai Gerindra ini berharap, dengan peningkatan kualitas layanan dalam negeri, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan nasional dapat tumbuh. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa perlu untuk berobat ke luar negeri. "Sehingga, bisa mendapatkan kepercayaan lebih lagi dari masyarakat dan tidak lagi berobat ke luar negeri, tapi bisa mengandalkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di dalam negeri," tutupnya.

Cek Kesehatan Gratis

Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, delegasi Komisi IX menyorot soal cek kesehatan gratis (CKS) di puskesmas. Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana yang pimpinan kunjungan ini, mendukung tersedianya puskesmas di Kota Palembang yang memiliki fasilitas ruang rawat inap.

"Insyaallah, puskesmas akan segera ada rawat inap. Ini juga sudah kami bahas dalam rapat," kata Meliyana kepada Parlementaria usai meninjau program CKG di Puskesmas Kampus di Jalan Golf, Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (16/4/2025) lalu.

Meliyana mengatakan bahwa Kemenkes mendukung adanya



Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana bersama tim saat meninjau Program CGK di Puskesmas Kampus di Jalan Golf, Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (16/4/2025).

fasilitas ruang rawat inap di sejumlah puskesmas di Palembang. Ini untuk mendukung program kesehatan pemerintah daerah setempat. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera terealisasi. Untuk dana masih diatur, karena Puskesmas itu, kan, miliknya pemerintah daerah, nanti pusat bakal bantu dalam kebijakan," ungkapnya.

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menilai bahwa program CKG dari Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan dengan baik. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat. "Cek kesehatan makin muda makin baik, jangan tunggu tua baru mau periksa. Jadi, ingat ya, kalau ulang tahun segera cek kesehatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat," pungkas legislator dapil Sumsel II ini.

Layanan Kesehatan Bertaraf Internasional

Di Provinsi Bali, Komisi IX DPR juga berkunjung ke Bali International Hospital yang diproyeksikan mampu memberi layanan

kesehatan bertaraf internasional. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan, penting rumah sakit ini mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang benar-benar bertaraf internasional. Hal itu sesuai dengan tujuan pendiriannya, yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dan menjadi destinasi wisata kesehatan internasional.

"Kita mengunjungi rumah sakit internasional pertama di Indonesia yang terletak di kawasan ekonomi khusus. Rumah sakit ini dibangun atas kerja sama BUMN, dalam hal ini Pertamina, dengan rumah sakit-rumah sakit swasta baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Yahya kepada Parlemenaria di Bali, Senin (14/4/2025) lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menekankan, keberadaan rumah sakit internasional ini diharapkan mampu mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang selama ini memilih berobat ke luar negeri. Oleh karena itu, menurutnya, seluruh aspek pelayanan rumah sakit harus memenuhi standar internasional.

"Yang penting untuk kita ketahui, karena ini rumah sakit bertaraf internasional, maka pelayanannya juga harus bertaraf internasional. Alat kesehatannya, sumber daya manusianya, tenaga kesehatannya semuanya harus bertaraf internasional, sehingga tujuan utama dari pendirian rumah sakit ini untuk mengurangi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri bisa terpenuhi," harap legislator Dapil Jatim VIII tersebut. eki,we,pdt/mh



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (14/4/2025).

Memperjuangkan Pendidikan Inklusif di Daerah 3T

Komisi X DPR RI menunjukkan fokus yang kuat pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Isu pendidikan inklusif menjadi perhatian utama dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah, saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi X DPR ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/4/2025).

Tantangan pendidikan dan potensi pariwisata di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta pemanfaatan inovasi tradisional mendapat sorotan. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/4/2025) lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR

RI Himmatul Aliyah menegaskan komitmen untuk memperjuangkan pendidikan inklusif dalam RUU Sisdiknas.

Menyusul peninjauan kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Makassar, Himmatul menyoroti masih rendahnya akses pendidikan formal bagi anak berkebutuhan

khusus, yang baru mencapai sekitar 12 persen. "Kami dari Komisi X akan mengoptimalkan pendidikan kebutuhan khusus dan sekolah pendidikan inklusi dalam RUU Sisdiknas," ungkap Himmatul.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti tantangan serius di bidang pendidikan saat melakukan dialog di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (10/4/2025) lalu. Esti mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan di wilayah 3T tersebut.

Ia menyoroti efektivitas anggaran pendidikan yang sebagian besar terserap untuk gaji dan operasional, sehingga anggaran untuk peningkatan kualitas pendidikan menjadi terbatas. "Beberapa indikator



Kami dari Komisi X akan mengoptimalkan pendidikan kebutuhan khusus dan sekolah pendidikan inklusi dalam RUU Sisdiknas

Himmatul Aliyah
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

yang menjadi perhatian utama adalah rendahnya rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan, baik secara murni maupun kasar," ujarnya saat berdialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Mentawai, Sumatera Barat.

Selain pendidikan, Komisi X juga melihat potensi pariwisata Mentawai



FOTO: TAUHAN/VEL

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati foto bersama usai berdialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Mentawai, Sumatera Barat, Kamis (10/4/2025).

yang besar dan berkomitmen untuk mendorong promosinya melalui berbagai media. Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur turut menyampaikan komitmennya memajukan pariwisata Mentawai melalui media sosial.

"Mentawai memiliki pariwisata yang menarik, hanya saja masih kurang promosi. Saya pribadi akan turut memajukan promosi pariwisata Mentawai melalui media sosial," tutur Denny.

Terkahir, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan saat kunjungan kerja reses, Kamis (10/04/2025) silam.

Ia menyoroti masalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan tantangan geografis yang menghambat pemerataan layanan pendidikan.

"Apa yang kita temui di lapangan, termasuk tantangan geografis, sosial,

dan ekonomi, akan menjadi rujukan dalam pembahasan anggaran bersama mitra kementerian," ujarnya.

Ferdiansyah juga mendorong penguatan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk menjangkau wilayah sulit. Selain itu, ia mengapresiasi potensi pemanfaatan riset dan teknologi tradisional untuk pembangunan lokal, mencontohkan inovasi pada teknologi berbasis

kearifan lokal.

Hasil dari berbagai kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 serta dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan di seluruh Indonesia. — nap,tri,ica/mh



FOTO: ICA/VEL

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi X ke Kalimantan Selatan, Kamis (10/04/2025).

Sorotan tertuju pada efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Timur, peran strategis Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kudus, serta respons pemerintah terhadap tarif impor Amerika Serikat demi melindungi perusahaan dalam negeri.

Dalam kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (11/4/2025) lalu, Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menekankan pentingnya penguatan dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran KUR bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur. Ia mengapresiasi kontribusi signifikan KUR terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meminta agar dukungan perbankan terus diperkuat, mengingat peran vital UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.

"Kami ingin melihat sejauh mana dampak penyaluran KUR terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Timur," ujarnya kepada Parlementaria. Hingga saat ini, penyaluran KUR secara nasional sudah mendekati Rp1.000 triliun, dengan kontribusi Jawa Timur yang tergolong signifikan. Program ini dinilai berdampak langsung pada sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Bank BRI menegaskan komitmennya sebagai penyalur KUR terbesar, sementara BNI memaparkan upaya dalam mendukung keuangan inklusif. OJK turut menyampaikan data terkini kondisi perbankan dan mengingatkan kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi. Komisi XI DPR RI berkomitmen mengawal penyaluran KUR agar tepat sasaran.

Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025 dengan fokus pada sektor produksi dan menjangkau lebih banyak debitur baru. Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menyoroti peran strategis

Dari Soal KUR Sampai Tarif Dagang AS Jadi Pembahasan

Komisi XI DPR RI menunjukkan perhatian mendalam terhadap berbagai aspek ekonomi nasional melalui serangkaian kunjungan kerja reses.



Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, bersama tim saat foto bersama usai pertemuan di Surabaya, Provinsi Jawa Timur Jumat (11/4/2025).

IHT dalam menopang pendapatan negara dan daerah serta penyerapan tenaga kerja saat berkunjung ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025) lalu.

Ia menekankan kontribusi besar cukai rokok terhadap keuangan negara dan peran IHT dalam menyerap tenaga kerja, khususnya di Kudus sebagai sentra industri

tembakau nasional. Musthofa juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pendistribusian pendapatan cukai dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

"Pendapatan dari cukai besar, tapi nilai manfaatnya yang utama. Produksi rokok menyerap banyak tenaga kerja, dan ini penting untuk daerah seperti Kudus," ujarnya kepada Parlementaria. Dalam kunjungan



Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (15/4/2025).

yang dihadiri Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris itu, ia menambahkan bahwa tahun 2025 target penerimaan dari cukai mencapai Rp48 triliun, angka yang signifikan bagi anggaran negara.

Diketahui, Jawa Tengah merupakan salah satu sentra industri hasil tembakau terbesar di Indonesia. Provinsi tersebut memiliki kontribusi sektor IHT sebesar 15,78 persen terhadap industri manufaktur. Data BPS menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang DBHCHT senilai Rp1.09 triliun pada 2024 dan menyerap lebih dari 92 ribu tenaga kerja langsung, serta lebih dari 131 ribu petani di sektor hulu.

Di Kudus, kontribusi industri rokok terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 70 persen. Kondisi ini menjadikan IHT sebagai penggerak utama ekonomi lokal sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat. Musthofa pun menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, termasuk dalam pembahasan lanjutan terkait pajak rokok bersama Dirjen Pajak. Ia berharap dukungan dan sinergi antara pusat dan daerah

terus diperkuat demi menciptakan kebijakan yang tidak hanya adil, tetapi juga berkelanjutan bagi pelaku industri dan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

Sementara menanggapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke Bea Cukai Jawa Barat, Selasa (15/04/2025) lalu. Wakil Ketua Komisi XI DPR

RI Mohamad Hekal menekankan prioritas pemerintah harus melindungi perusahaan dalam negeri dari tekanan global. Ia mendorong pemerintah mengaktifkan instrumen fiskal seperti insentif pajak dan subsidi.

"Kita ingin memastikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia tidak mengawatirkan terhadap pelaku Industri dan pelaku usaha di Indonesia," ujar Hekal saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XI di Kantor Wilayah Kantor Bea Cukai Kota Bandung.

Menurutnya, langkah prioritas pemerintah harus difokuskan pada perlindungan terhadap perusahaan dalam negeri. Ia menilai bahwa perusahaan nasional tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan global secara mandiri, karena hal itu berisiko memicu kebangkrutan yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja secara massal.

"Pemerintah dapat mengaktifkan berbagai instrumen fiskal seperti insentif pajak, subsidi, dan kemudahan pembiayaan sebagai bentuk dukungan konkret untuk menjaga stabilitas sektor usaha," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

— rni, srw, man/mh



Anggota Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal.

Urgensi Revisi UU Migas dan Potensi Panas Bumi Sumbar

Komisi XII DPR RI menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap sektor energi dan sumber daya mineral melalui serangkaian kunjungan kerja reses. Isu yang mengemuka adalah potensi panas bumi di Sumatera Barat.



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (K3S) di Bromo, Jawa Timur, Senin (14/4/2025).

Pada kunjungan kali ini potensi energi alternatif ramah lingkungan selalu dikaitkan dengan revisi UU Migas. Hilirisasi pun mendapat sorotan, agar tak terkendala target *zero emission*. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto dalam kunjungan ke Jawa Timur, Senin (14/4/2025) lalu, menegaskan urgensi revisi UU Migas yang akan memberikan kepastian hukum dan usaha yang sangat dibutuhkan industri migas yang padat modal dan teknologi.

"Undang-Undang itu memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha," ujar Sugeng kepada Parlementaria usai pertemuan dengan SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (K3S) di Bromo, Jawa Timur. Sugeng menyoroti beberapa pasal UU Migas lama yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi, termasuk kelembagaan regulator hulu (SKK Migas) yang disarankan untuk diubah menjadi Badan Usaha Khusus.

Pembahasan mengenai bentuk Badan Usaha Khusus ini sedang dirumuskan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi keberlanjutan industri migas. "Itulah perlunya di sektor hulu dalam bentuk Undang-Undang," pungkasnya. Revisi UU Migas, menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, sangat penting untuk memastikan kelancaran dan

FOTO: GAUHH/VEL

“

Potensi energi alternatif ramah lingkungan selalu dikaitkan dengan revisi UU Migas. Hilirisasi pun mendapat sorotan, agar tak terkendala target zero emission.

Sugeng Suparwoto
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI

keberlanjutan industri migas di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi mendorong percepatan dan optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi di Sumatera Barat saat kunjungan kerja ke Padang, Rabu (16/04/2025) silam. Ia menilai potensi panas bumi Sumbar yang mencapai lebih dari 1.000 MW belum dimanfaatkan maksimal.

Mulyadi mengapresiasi langkah PT Supreme Energy yang telah memproduksi 80 MW dan berencana menambah 80 MW lagi.

Ia melihat panas bumi sebagai solusi energi bersih yang berkelanjutan dan akan terus mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk mempercepat eksplorasi dan pembangunan PLTP di Sumbar. Mulyadi juga menyinggung pentingnya kapasitas transmisi antarwilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi.

"Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, seperti batubara yang masih menjadi sumber utama bagi PLTU Teluk Sirih dan PLTU Ombilin. Panas bumi adalah solusi tepat karena bersifat



FOTO: SINGGIH/VEL

Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Sumatera Barat, di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/04/2025).

“

Langkah ini sejalan dengan upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil

Mulyadi
Anggota Komisi XII DPR RI

ramah lingkungan dan berkelanjutan," katanya.

Mulyadi menambahkan, meskipun biaya eksplorasi panas bumi cukup besar, namun investasi ini penting untuk jangka panjang. Ia menyatakan bahwa DPR akan terus mendorong pemerintah pusat dan pelaku usaha untuk mempercepat proses eksplorasi dan pembangunan

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di berbagai titik di Sumbar.

Terkait dengan kebutuhan listrik, Mulyadi juga menyinggung soal kapasitas transmisi antarwilayah. "Kalau produksi listrik dari panas bumi ini belum cukup, kita sudah bisa memanfaatkan jaringan interkoneksi Pulau Sumatera. Tapi kalau kelebihan pun, listrik bisa disuplai ke wilayah lain. Hanya saja, jaringan kabelnya masih terbatas, setahu saya baru 150 kWh," jelasnya.

Menurut Mulyadi, pengembangan panas bumi harus dilihat sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. "Sumatera Barat tidak punya sumber daya alam sebesar Riau atau Sumsel, tapi kita punya potensi panas bumi yang luar biasa. Ini yang harus kita maksimalkan untuk kesejahteraan rakyat," pungkasnya. gal,skr,ayu/mh

Mendorong Penguatan Kesadaran Hukum

Komisi XIII DPR RI menyoroti berbagai isu strategis terkait penegakan hukum, imigrasi, serta kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di berbagai daerah dalam kunjungan kerjanya kali ini.



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, saat memimpin kunjungan kerja reses di Manado, Jumat (11/4/2025).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Ia mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih fokus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta memperkuat harmonisasi peraturan daerah guna

mencegah konflik sosial akibat minimnya pemahaman regulasi.

Menurutnya, tingginya jumlah narapidana di Lapas mencerminkan kurangnya kesadaran hukum dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, kata Andreas kepada Parlemen, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (11/4/2025).

Pada bagian lain, harmonisasi peraturan daerah juga dinilai penting. Dalam hal ini, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta kantor wilayah (kanwil) di daerah memiliki tugas penting dalam harmonisasi dan membantu proses pembuatan peraturan daerah (perda).

"Saya kira ini juga penting menjadi perhatian, karena banyak sekali perda itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perda-perda yang berkaitan dengan pentingnya hak asasi, perda-perda yang berkaitan dengan banyak hal di daerah, (misalnya) soal tanah itu menjadi masalah, karena orang tidak paham soal aturan main berada di daerah," jelasnya.

“

Mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lebih fokus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat

Andreas Hugo Pareira
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga menyinggung perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk kanwil hukum di daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Senada dengan itu, Anggota Komisi XIII lainnya, Muslim Ayub, mengangkat isu penyalahgunaan visa wisata oleh warga negara asing di Aceh, khususnya dari Tiongkok, Vietnam, dan Thailand.

Ia menyoroti turis asing yang justru bekerja secara ilegal di wilayah pesisir Aceh, yang menurutnya berpotensi merugikan tenaga kerja lokal. "Imigrasi yang menjadi persoalan adalah banyaknya turis



Anggota Komisi XIII, Muslim Ayub, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (10/4/2025).



Kantor Imigrasi di wilayah barat-selatan Aceh memperketat pengawasan dan penegakan aturan

Muslim Ayub
Anggota Komisi XIII DPR RI

asing, terutama dari Cina, Vietnam, dan Thailand, yang datang ke Aceh menggunakan visa wisata, tapi nyatanya bekerja,” ujar Muslim kepada Parlementaria di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (10/4/2025) lalu.

Muslim meminta Kantor Imigrasi di wilayah barat-selatan Aceh memperketat pengawasan dan penegakan aturan keimigrasian agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, dari Sumatera Barat, Wakil Ketua Komisi XIII Rinto Subekti menyoroti kondisi Lapas yang sudah tua dan mengalami overkapasitas. Ia mendesak percepatan renovasi serta pembangunan Lapas baru melalui

kerja sama antara Kemenkumham dan pemerintah daerah. Rinto juga menekankan pentingnya penambahan kantor imigrasi di Sumatera Barat yang saat ini dinilai tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan layanan paspor dari masyarakat.

“Lapas-lapas di Sumatera Barat sudah sangat memerlukan perhatian. Selain bangunannya sudah tua, kapasitasnya pun sudah jauh melebihi batas. Belum lagi kendala-kendala

teknis seperti sistem kelistrikan yang mengganggu operasional,” ujar Rinto kepada Parlementaria.

Ia mendorong adanya inovasi dan kolaborasi antara Kemenkumham dengan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan lahan



Lapas-lapas di Sumatera Barat sudah sangat memerlukan perhatian

Rinto Subekti
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

untuk pembangunan Lapas baru sebagai solusi jangka panjang. “Kami meminta agar jajaran terkait berkolaborasi dengan Pemda, misalnya melalui hibah lahan, sehingga bisa dilakukan relokasi atau pembangunan Lapas baru yang lebih layak dan manusiawi,” tambah legislator dari Dapil Jawa Tengah tersebut. [@bia,uf,aas/mh](#)



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi XIII DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Rabu (9/4/2025).

Menanti Ketegasan Pemerintah Lindungi Aktivitas Jurnalis

Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Tanah Air dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian publik. Dampaknya, publik semakin sadar sekaligus aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan hakim semakin aktif mengungkap hal itu.



Anggota Komisi III DPR RI
Abdullah.

Kerja cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan wartawan sangat penting. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi spekulasi dan opini di masyarakat yang bisa berkembang luas. Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), puluhan kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi setiap tahun. Pada 2023, misalnya, AJI mencatat 89 kasus kekerasan terhadap jurnalis, meningkat dari 43 kasus pada 2022.

Mayoritas pelakunya berasal dari aparat keamanan dan pejabat publik, disusul kelompok tak dikenal dan massa protes. Lalu, terjadi 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media pada 2024. Jumlah itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 89 kasus. Sementara pada tiga bulan pertama 2025, kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, tercatat sudah 22 kasus kekerasan dan terror, termasuk intimidasi fisik, serangan digital, hingga femisida (pembunuhan berbasis gender).

Kekerasan fisik yang dialami jurnalis, seperti pemukulan, ancaman, dan pelecehan verbal. Misalnya, kasus ajudan Kapolri yang memukul fotografer Antara, Makna Zaezar, saat peliputan di Semarang, disertai ancaman. Adapun kekerasan melalui serangan berbasis gender, seperti yang dialami Francisca Christy Rosana (Tempo) yang menerima kiriman kepala babi dan bangkai tikus, serta Juwita (Newsway.co.id) yang

FOTO: DEP/VEL

diduga dibunuh oleh anggota TNI AL.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengungkapkan, peristiwa tersebut perlu diselidiki secara menyeluruh dan transparan. Sebab, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mereka harus dilindungi dalam menjalankan tugasnya.

"Segala bentuk ancaman, intimidasi, maupun kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan, karena ini adalah ancaman nyata terhadap demokrasi dan kebebasan pers," ujar pria yang kerap disapa Kang Aher itu. Adapun kekerasan dalam bentuk femisida dan kekerasan seksual terjadi terutama saat meliput isu sensitif seperti demonstrasi menolak UU TNI.

Dari aspek penyelesaian kasus, terlihat masih minim penuntasan. Dari 73 kasus kekerasan pada 2024, hanya satu kasus yang tuntas secara hukum. Mayoritas pelaku—termasuk aparat TNI, polisi, dan pejabat—lolos dari hukuman atau hanya mendapat sanksi ringan. Bahkan, AJI mencatat tren kasus "diselesaikan" dengan permintaan maaf, seperti insiden pemukulan oleh ajudan Kapolri yang hanya berujung permintaan maaf tanpa proses hukum.

Kasus teror kepala babi terhadap Tempo (Maret 2025) dan perusakan kendaraan jurnalis sebelumnya pun hingga kini belum tuntas.

Kebanyakan kasus tidak diproses secara adil dan transparan. Perlindungan terhadap jurnalis belum optimal karena lemahnya komitmen penegak hukum dan belum maksimalnya implementasi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang sebenarnya menjamin kebebasan pers dan imunitas jurnalis dari kriminalisasi atas karya jurnalistiknya.

Dampak Kekerasan

Persoalan kekerasan terhadap jurnalis ini bukan hal yang sederhana.



FOTO: DOK/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan.

Ini karena berdampak terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Misalnya, dari aspek *self-censorship* dan trauma, ancaman kekerasan memicu jurnalis melakukan pembatasan diri dalam peliputan (*self-censorship*) dan trauma psikologis.

Serangan terhadap jurnalis perempuan mencerminkan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis, terutama terkait isu militer, korupsi, dan HAM. Bahkan, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi terancam, karena jurnalis tidak dapat bekerja secara independen.

Atas kasus bertubi-tubi yang terjadi pada jurnalis itu, Koalisi Masyarakat Sipil pun menempuh upaya advokasi dan tuntutan kepada Pemerintah.

AJI, Komnas Perempuan, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ)

mendesak Polri mengusut tuntas kasus dengan menerapkan Pasal 18 UU Pers dan menghukum pelaku.

Komnas Perempuan juga mendorong implementasi Peraturan Dewan Pers No.2/2024 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan media. Sehingga, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat HAM pun perlu bersatu melawan impunitas dan mendukung keselamatan jurnalis.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri memberikan edukasi khusus untuk seluruh anggota polisi terkait kerja jurnalis. "Saya rasa menjadi mendesak saat ini melakukan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dari anggota polisi maupun aparat keamanan dari instansi lainnya terkait kerja-kerja pers. Termasuk juga tentang kebebasan pers dan HAM," kata Abdullah.  rdn/mh

Sidang IPU ke-150

Menyuarakan Kembali Kemerdekaan Palestina

Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, 5–9 April 2025, menjadi panggung penting bagi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI. kemerdekaan Palestina kembali disuarakan dengan lantang oleh delegasi parlemen Indonesia di hadapan para delegasi parlemen dunia.

Melalui diplomasi parlemen, BKSAP DPR konsisten menunjukkan kepeduliannya terhadap rakyat Palestina dan membela nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal. Di tengah kompleksitas geopolitik global dan tarik ulur kepentingan antarnegara, BKSAP tampil lantang dan tegas membela kemerdekaan Palestina. Dalam forum bergengsi Sidang Umum IPU ke-150, isu Palestina menjadi sorotan utama, terutama ketika pertama kalinya resolusi two-state solution berhasil diadopsi secara resmi oleh 130 delegasi negara anggota IPU.

Gagasan solusi dua negara menjadi pokok perdebatan yang alot dalam sidang kali ini. Solusi ini mengedepankan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, hidup berdampingan secara damai dengan Israel dan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Meski bukan solusi sempurna, pendekatan ini dianggap sebagai jalan paling realistis untuk mengakhiri

konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban jiwa, terutama perempuan dan anak-anak.

"Saya kira kita harus berbangga menjadi bagian dari sejarah penting IPU, dimana untuk pertama kalinya diadopsi resolusi dua negara untuk

Palestina. Hal ini memang berat untuk Palestina tetapi, kita harus berpikir realistis agar wanita dan anak-anak yang tidak berdosa segera terhindar dari genosida yang dilakukan oleh Israel," demikian penjelasan Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, pertengahan April lalu.

Walkout Delegasi Israel

Salah satu momen paling mencolok dalam sidang IPU ke-150 ini adalah walkout-nya delegasi Israel dari sesi Standing Committee on Peace and Security. Ini adalah kali pertama dalam sejarah IPU delegasi Israel kalah secara total dalam forum resmi parlemen dunia, terutama



Anggota BKSAP DPR RI, Jazuli Juwaini, saat mengikuti rangkaian Sidang Umum Organisasi Parlemen Dunia (IPU) ke 150, di Tashkent Uzbekistan.

FOTO: BKSAP/VEL



FOTO: BKSAP/VEL

Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera, bersama delegasi BKSAP DPR RI saat menghadiri Sidang Parlemen Dunia (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan.

dalam perdebatan terkait Palestina.

"Alhamdulillah, ini luar biasa sekali perjuangannya. Kita berhasil membuat delegasi Israel walkout. Biasanya mereka kuat secara politik, tapi kali ini isu kemanusiaan dan perdamaian lebih didengar," kata Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera dalam keterangannya yang diterima Parlemenaria, pertengahan April silam.

Mardani menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangan membela Palestina. "Kita punya utang konstitusi kepada Palestina. Mereka adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Kini, saatnya kita tunjukkan solidaritas kita," ujarnya.

Tiga Agenda Strategis

Mardani mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong tiga agenda strategis. "Pertama, percepatan penandatanganan EU-CEPA agar produk Indonesia bisa masuk pasar

“
Indonesia tidak pernah mundur dalam perjuangan membela Palestina

Mardani Ali Sera
Ketua BKSAP DPR RI

Uni Eropa tanpa hambatan. Kedua, dukungan untuk mempercepat keanggotaan Indonesia dalam OECD. Dan ketiga, penguatan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial," paparnya.

Bahkan, parlemen Turki dan Indonesia intens membahas peta jalan menuju kemerdekaan Palestina serta dukungan kemanusiaan bagi Gaza. "Kami juga menjajaki penguatan hubungan bilateral yang lebih mendalam dengan Turki, khususnya dalam isu-isu

strategis kawasan," tambah Mardani. Sementara dialog dengan parlemen India berfokus pada kerja sama pendidikan, pembentukan kelompok persahabatan antarpalemen, serta upaya membuka akses pasar yang lebih luas.

"Semua ini kami lakukan demi satu tujuan besar, menjadikan Indonesia negara maju pada 2045," tegasnya. Selain forum pleno IPU, BKSAP DPR RI juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan bilateral strategis. Dengan parlemen Uni Eropa, Indonesia mendorong percepatan penandatanganan EU CEPA demi membuka akses pasar bagi produk-produk Indonesia.

Menurut Mardani, langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi besar memperkuat posisi Indonesia secara global, sekaligus menjadikan Indonesia sahabat setia Palestina. "Ini semua bagian dari target besar Indonesia menuju negara maju 2045," tambahnya. **gal/mh**

Pulung Agustanto Silaturahmi Sekaligus Serap Aspirasi

Komitmen untuk selalu dekat dengan rakyat terus ditunjukkan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya sebagai wakil rakyat, Pulung melaksanakan kegiatan reses di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Maret lalu.



Anggota DPR RI Pulung Agustanto saat melakukan kegiatan reses di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Ia menyampaikan bahwa alokasi kegiatan reses yang diterimanya cukup besar, sehingga memungkinkan untuk mengunjungi lebih banyak titik di dapil. Bagi Pulung, menjalin hubungan dengan masyarakat bukan hanya dilakukan saat masa kampanye. Ia percaya bahwa tempat-tempat yang pernah ia datangi saat kampanye memiliki nilai historis dan emosional tersendiri, baik bagi dirinya maupun masyarakat setempat.

"Bagaimanapun caranya, saya harus kembali mendatangnya untuk mendengarkan permintaan dan



Kegiatan reses yang diterimanya cukup besar, sehingga memungkinkan untuk mengunjungi lebih banyak titik di dapil

permasalahan yang disampaikan masyarakat," tambahnya.

Kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin, melainkan momen penting bagi wakil rakyat untuk menyerap langsung aspirasi rakyat. Pulung menegaskan bahwa seluruh masukan dari masyarakat akan dibawa ke Senayan untuk diperjuangkan dalam forum-forum resmi DPR RI. [pun/mh](#) [gal/mh](#)

"Saya ingin tetap silaturahmi, ingin tetap memberitahu bahwa silaturahmi ini tidak akan berhenti," ujarnya.

Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI yang meliputi Kabupaten dan Kota Kediri serta Kabupaten Tulungagung, Pulung menyadari pentingnya menjangkau seluruh wilayah dapilnya.



Eric Hermawan

Dorong Pengembangan Ekraf dan Industri Garam

Anggota DPR RI Eric Hermawan mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan industri garam di dapil Jatim XI (Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Sampang). Dua sektor ini jadi prioritas perhatiannya setiap kali kunjungan dapil.

Eric menggelar pertemuan dengan para pelaku UMKM, tokoh masyarakat, Kegiatan tersebut dihadiri, pengurus DPD Partai Golkar Sampang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku UMKM serta simpatisan dan relawan.

"Saya memulai reses perdana di sini, (Sampang). Besok, saya baru mengunjungi konstituen saya di dapil Jatim XI lainnya, ujar politisi Partai Golkar ini ketika memberikan

sambutan dalam pembukaan reses perdananya tersebut. Di hadapan tamu undangan, Eric menjelaskan, dirinya saat ini bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif.

"Saya berupaya menyerap aspirasi dari masyarakat lapisan bawah. Saya berkomitmen dan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan," ujarnya. Ia berjanji akan mengupayakan program pelatihan khusus pelaku UMKM untuk

meningkatkan kualitas produk serta akses permodalan yang lebih mudah.

"Kami akan mengupayakan program pelatihan khusus untuk UMKM dan memperjuangkan akses permodalan yang lebih mudah di tingkat pusat," janjinya. Sementara soal industri garam, ia mengatakan, Pulau Madura khususnya di Sampang memiliki potensi besar industri garam. Setiap tahun jumlah produksi garam mencapai ratusan ribu ton. Namun, sampai saat ini di Sampang belum ada teknologi industri garam.

"Peluang swasembada garam sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Seperti sama-sama kita lihat, di Sampang ini banyak sekali tambak garam. Cuma sekarang teknologinya saja yang belum ada. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberikan solusi," pungkas Eric. **tn/mh**



Anggota DPR RI Eric Hermawan saat melakukan kegiatan reses di dapil-nya Jatim XI (Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Sampang).



Anggota DPR RI Muhammad Rahul saat mengunjungi korban banjir di Pekanbaru.



Muhammad Rahul Serahkan Bantuan Korban Banjir

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul mendapati kenyataan, pemukiman di kawasan Rumbai, Pekanbaru, Riau terendam banjir. Ketika datang langsung ke lokasi, pertengahan Maret lalu, banjir sudah surut.

Namun, masyarakat setempat masih diliputi kekhawatiran, mengingat cuaca masih dalam keadaan mendung. Belum lagi permasalahan sampah dan lumpur yang terbawa air karena banjir.

Rahul yang mengajak anggota DPRD Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru, serta pejabat daerah serempat, langsung meminta dinas terkait diantaranya dinas kebersihan

dan kesehatan untuk memfasilitasi keluhan warga. Diantaranya pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat serta vitamin bagi para korban banjir, serta yang tidak kalah pentingnya bantuan air bersih.

Dalam kesempatan itu, Rahul membawa seribu paket sembako untuk masyarakat yang menjadi korban dan terdampak banjir. Bahkan, pihaknya menyempatkan diri meninjau dapur umum yang

disediakan Polresta Pekanbaru untuk warga korban banjir. Ini untuk memastikan bahwa penanganan korban banjir berjalan baik.

Masyarakat pun mendapat asupan makanan yang bergizi. Pasalnya, pascabanjir, para korban berisiko terserang berbagai penyakit, selain gatal-gatal juga flu, pilek, dan batuk.

"Bantuan ini merupakan wujud nyata dari komitmen saya dan Partai Gerindra dalam membantu masyarakat yang tengah tertimpa musibah, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Karena itu, saya hadir langsung bersama seluruh Fraksi Gerindra di Provinsi dan Kota Pekanbaru. Kita ingin mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan masyarakat, lalu akan kita carikan solusinya," ujar Rahul.

Selain bantuan darurat, sambung Rahul, yang tidak kalah pentingnya, mencari solusi jangka panjang, agar bencana serupa tidak berulang di daerah tersebut. Ia menilai perlu ada upaya konkret mengatasi permasalahan ini, agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban saat musim hujan tiba. **ayu/mh**

Dini Rahmania

Kawal Program Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Legislator Dapil Jawa Timur II Dini Rahmania menggelar pertemuan dengan para relawan bencana alam di Pendopo Agung, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (10/4) lalu.

Ning Dini menyadari, dengan situasi rawan bencana alam, tugas dan tanggung jawab relawan tidaklah mudah. Para relawan merupakan pahlawan kemanusiaan yang berada di garda terdepan. Demi mendukung para relawan, Ning Dini berkomitmen mengawal program-program mitigasi bencana berbasis masyarakat.

"Harapan kami kampung-kampung siaga bencana seperti di kawasan Tengger ini dapat menjadi role model bagi daerah lain. Kami percaya bahwa ketangguhan bangsa ini dibangun dari ketangguhan desa-desa dan komunitas," tegasnya. "Mari kita terus saling menguatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan," sambung Ning Dini.  **bia/mh**

Wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Probolinggo dan Pasuruan itu menyapa dan menyerap aspirasi dari para relawan yang tergabung dalam Tim Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, dan Satgas Jaga Baya Tengger. "Probolinggo, khususnya

kawasan Tengger dan sekitarnya merupakan daerah dengan risiko bencana tinggi. Seperti beberapa hari terakhir kejadian yang jadi perhatian bersama mulai cuaca ekstrim, angin kencang, hingga meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Bromo. Itu semua menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mutlak," ujar Ning Dini, sapaan akrabnya.



Anggota DPR RI Dini Rahmania saat menggelar pertemuan dengan para relawan bencana alam di Probolinggo, Jawa Timur.

Mahdalena Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena menyalurkan bantuan logistik dari Kementerian Sosial (Kemensos) kepada korban banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (29/1/2025). Bantuan tersebut disalurkan ke Desa Nisa dan Desa Naru, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, yang terdampak banjir.

Banjir kerap menyerang Kabupaten Bima dan Dompu, NTB. Politisi PKB itu menegaskan bahwa pihaknya akan

terus mengawal upaya mitigasi bencana bersama para pemangku kepentingan. "Ini akan menjadi atensi bagi kami untuk menindaklanjuti masukan dari masyarakat terkait

mitigasi dan penanggulangan bencana banjir," ujar Mahdalena.

Mahdalena berharap, ada sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam upaya penanganan banjir secara berkelanjutan. "Diperlukan langkah konkret dalam mitigasi dan solusi jangka panjang, agar kejadian ini tidak terus berulang setiap tahun," katanya.

Selain bantuan dari Kemensos, Mahdalena juga memberikan bantuan berupa 150 paket beras dan minyak goreng kepada warga terdampak banjir di Desa Baralalu, Kecamatan Monta. Tidak hanya itu, ia juga menyalurkan 88 paket beras untuk korban banjir di Desa Sakuru, Kecamatan Monta.

"Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir," harap Mahdalena. Ia juga menekankan perlu kerja sama semua pihak dalam menangani bencana banjir yang terus melanda wilayah Bima setiap tahun.

 hir/mh



Anggota DPR RI Mahdalena saat memberikan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Cellica Nurrachadiana Kecam Limbah Medis di Karawang

Sebuah kantong plastik hitam tergeletak di tumpukan sampah. Isinya limbah medis berupa jarum suntik, selang infus, botol obat, hingga dokumen medis pasien. Limbah medis itu ditemukan warga Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Limbah tersebut tentu membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.



FOTO: DOK/VEL

Anggota DPR RI Cellica Nurrachadiana.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Cellica Nurrachadiana tak tinggal diam melihat dugaan kelalaian pihak rumah sakit dalam membuang limbah medis berbahaya dan beracun (B3). Ia mendesak kepolisian dan dinas terkait segera melakukan pengusutan. "Kejadian

ini sangat memprihatinkan dan kami mengecam keras perbuatan oknum yang melakukan hal tersebut," tegas Cellica dalam keterangan persnya, pertengahan April lalu.

Legislator dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta) itu, menyampaikan bahwa limbah B3 jelas dilarang keras dibuang sembarangan berdasarkan

PP No.22/2021, yang mengatur secara ketat pengelolaan limbah jenis ini. "Karena menyebabkan risiko kontaminasi, penularan penyakit, dan pencemaran lingkungan, seharusnya

“

Tak tinggal diam melihat dugaan kelalaian pihak rumah sakit dalam membuang limbah medis berbahaya dan beracun (B3).

pengelolaan limbah medis B3 sesuai standarisasi dan regulasi yang berlaku," jelasnya.

Tak hanya mengecam, mantan bupati Karawang dua periode ini, mendesak penegak hukum bertindak tegas atas temuan sampah B3 tersebut. Dinas kesehatan dan DLHK diserukan memperketat pengawasan limbah B3. [gal/mh](#)

Meitri Citra Wardani Salurkan Paket Sembako Bagi Warga Mojokerto



Anggota DPR RI Meitri Citra Wardani saat memberikan paket sembako kepada warga di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menyalurkan sebanyak 1800 paket sembako kepada masyarakat di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Maret silam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan selama masa reses yang bertepatan dengan sehari menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H, yang ditetapkan pemerintah jatuh pada 31 Maret 2025.

"Pembagian sembako ini bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu, agar tetap dapat merasakan kebahagiaan menjelang Idulfitri. Kegiatan ini

sengaja dirancang bertepatan dengan sehari menjelang lebaran sebagai bentuk THR untuk masyarakat," ujar Meitri.

Pembagian sembako ini wujud kepedulian kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang lebaran. Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini menjelaskan bahwa tradisi THR pada mulanya memang berbentuk bantuan bahan pokok dan hanya diperuntukan

bagi pegawai pemerintah, tetapi kini diubah dalam bentuk tunai.

Selain itu, sasaran THR tidak hanya diperuntukan bagi pegawai pemerintah, tetapi juga bagi pekerja swasta maupun bagi masyarakat dari berbagai lapisan. Meski begitu, Meitri memilih untuk kembali ke esensi awal dalam pembagian THR.

"Kami berikan dalam bentuk sembako, agar tepat sasaran dalam peruntukannya dan benar-benar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan primer rumah tangga, utamanya pemenuhan kebutuhan pangan di hari lebaran. Kami khawatir bila dalam bentuk tunai, ada sebagian yang mungkin menyalahgunakannya, misalnya untuk membeli rokok atau paket data, sehingga hal itu menyimpang dari tujuan awalnya," tambahnya. **hir/mh**

Sudian Noor Beri Pengarahan Bagi Calon Jemaah Haji

**Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN
Sudian Noor menekankan pentingnya niat dan
kesungguhan dalam mempersiapkan ibadah haji
kepada para calon jemaah haji Kabupaten Tanah
Bumbu, Kalimantan Selatan.**

ni disampaikan saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Manasik Haji yang digelar di Masjid Apung Ziyadatul Abrar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Senin (14/4/2025) lalu.

Dalam sambutannya, Sudian mengingatkan agar para jemaah mengikuti setiap rangkaian manasik dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai bekal utama saat berada di Tanah Suci. "Luruskan

niat untuk melaksanakan ibadah haji, ikuti bimbingan manasik haji dengan sebaik-baiknya, agar bisa memahami tentang pelaksanaan ibadah haji," sebutnya.

Ia juga mengimbau agar para jemaah menjaga fokus selama ibadah dan tidak banyak berbicara, terutama hal-hal yang tidak diperlukan. Menurutnya, pemahaman yang benar terhadap rukun, wajib, dan sunnah haji

sangat penting agar pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik.

"Contohnya seperti mencium hajar aswad yang harus berdesakan namun kondisi kita tidak memungkinkan. Jadi, kita harus tahu dan paham terkait mana yang ibadah wajib, sunnah, syarat, maupun rukun haji," ingatnya.

Tak hanya itu, Sudian juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kesiapan fisik dan mental sejak sebelum keberangkatan. Kegiatan bimbingan ini merupakan bagian dari persiapan yang rutin dilakukan setiap tahun sebelum pemberangkatan haji. Dalam laporannya, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, H. Rusbandi, menyebut bahwa manasik akan digelar sebanyak 10 kali, terdiri dari 2 kali di tingkat kabupaten dan 8 kali di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Yulian Herawati yang hadir mewakili Bupati menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam membekali calon jemaah secara teori dan praktik sesuai syariat. Bimbingan manasik haji sendiri dikenal sebagai tahapan vital dalam mempersiapkan para jemaah sebelum berangkat ke Makkah, sebagai bekal pengetahuan dan kesiapan rohani menjalankan rukun Islam kelima.  rdn/mh



Anggota Komisi DPR RI Sudian Noor saat membuka kegiatan Bimbingan Manasik Haji di Masjid Apung Ziyadatul Abrar, Kalimantan Selatan.



FOTO: JAKA/VEL

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, saat halalbihalal bersama keluarga besar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Halalbihalal DPR RI Semangat Memperbaiki Kinerja Dewan

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak keluarga besar DPR untuk menjadikan semangat Idulfitri sebagai titik tolak untuk terus memperbaiki kinerja lembaga DPR RI. Kinerja yang diharapkan adalah bekerja lebih profesional, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kita harus menunjukkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang hadir, peduli, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa,” tutur Puan di awal sambutan halalbihalal parlemen dengan tema “Perkuat Silaturahmi Keluarga Besar DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, pertengahan April lalu.

Lebih lanjut, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu percaya sinergi antara pimpinan dan anggota DPR, kesetjanaan, serta seluruh pegawai dapat mewujudkan DPR yang modern, inklusif, dan berintegritas tinggi. “Kepercayaan rakyat adalah modal utama kita. Jangan sampai itu tergerus oleh kelalaian atau sikap abai. Mari kita jaga amanah ini dengan



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Adies Kadir, saat menghadiri acara halalbihalal di Gedung Nusantara IV, Senin (14/4/2025).



FOTO: JAKA/VEL

sebaik-baiknya," sebut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Pada momen halalbihalal, Puan mengajak semua anggota DPR dan seluruh pegawai di lingkungan DPR semakin mempererat tali silaturahmi, komunikasi, serta sinergi. "Manfaatkanlah halalbihalal ini untuk mempererat tali silaturahmi kita, untuk mempererat komunikasi kita, dan sinergi kita," pesannya.

Puan pun meminta keluarga besar DPR melanjutkan pengabdian dengan hati yang bersih, saling memaafkan, dan dengan semangat yang baru. Ia meminta keluarga besar dewan agar terus memiliki tekad bulat untuk mewujudkan DPR yang semakin baik dari waktu ke waktu.

"Sekali lagi atas nama pimpinan DPR saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih kembali

dalam menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang," ucapnya.

Puan menegaskan bahwa halalbihalal bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta memperteguh semangat gotong royong di antara seluruh elemen DPR. "Kita yang bekerja di lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik," ungkapnya.

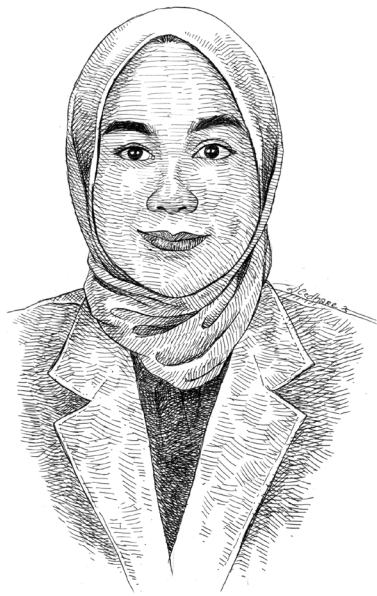
Lebih lanjut, Puan menilai bahwa keberhasilan DPR merupakan hasil kerja kolektif. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan mengevaluasi diri demi perbaikan ke depan.

"Kebaikan, keberhasilan itu karena kita. Namun kejelekan, ketidakberhasilan juga karena kita.

Jadi ke depan saya berharap kita bisa sama-sama bergotong royong, memperbaiki atau introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin mungkin kurang baik, ke depan kita perbaiki," serunya.

Dalam acara ini, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Halalbihalal dihadiri pula Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, dan pegawai Setjen DPR.

Acara halalbihalal berlangsung sangat meriah dengan menghadirkan tausiyah yang diisi langsung oleh Ustadz Hilman Fauzi, Komika Akbar Kobar, serta penyanyi religius Haddad Alwi. Dalam acara ini juga dibagikan sejumlah *doorprize* bagi peserta yang beruntung sebagai pelengkap kemeriahan. **tn/mh**



Oleh:
Ainun Rizki Aussiana
 RS Kasih Ibu Kedonganan
 Bali

Hari Hemofilia Sedunia

Mengenai Hemofilia Lebih Dekat

Tanggal 17 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hemofilia Sedunia (World Hemophilia Day). Tanggal ini dipilih untuk menghormati kelahiran Frank Schnabel, pendiri *World Federation of Hemophilia* (WFH), organisasi internasional yang berdedikasi dalam meningkatkan kehidupan penderita hemofilia dan kelainan perdarahan lainnya di seluruh dunia.

Menurut WFH, sekitar 400.000 orang di dunia hidup dengan hemofilia, namun hanya sekitar 25% yang terdiagnosis dan mendapatkan perawatan yang memadai. Ini berarti masih ada ratusan ribu orang, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang mungkin hidup dengan kondisi ini tanpa mengetahui apa yang sebenarnya mereka alami.

Kondisi ini menjadi tantangan besar, karena hemofilia bukan hanya soal perdarahan—tetapi soal kualitas hidup, akses ke pengobatan, dan hak untuk hidup sehat seperti orang lain. Di sinilah pentingnya Hari Hemofilia Sedunia: sebagai panggilan global untuk meningkatkan kesadaran, memperluas akses ke diagnosis dan pengobatan, serta membangun solidaritas antara penderita,

keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas.

Apa Itu Hemofilia?

Hemofilia adalah kelainan genetik yang menyebabkan tubuh kekurangan protein khusus yang dibutuhkan untuk pembekuan darah, yaitu faktor pembekuan. Tanpa faktor ini, seseorang yang mengalami luka, bahkan kecil sekalipun, bisa mengalami perdarahan yang lebih lama dari orang normal.

Terdapat dua jenis hemofilia yang paling umum:

- Hemofilia A – disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan VIII (8)
- Hemofilia B – disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan IX (9)

Penyakit ini diturunkan secara genetik, dan karena terkait dengan kromosom X, maka akan menimbulkan gejala pada laki-laki, sedangkan perempuan biasanya menjadi pembawa (carrier) tanpa gejala. Namun dalam kasus langka,

perempuan juga bisa mengalami gejala hemofilia bila memiliki mutasi pada kedua kromosom X.

Gejala Hemofilia:

Gejala hemofilia bisa muncul sejak usia dini, pada anak laki-laki terutama jika mengalami gejala yang berat. Berikut gejala-gejala yang perlu diwaspadai:

- 1. Perdarahan Berkepanjangan**
Luka kecil seperti goresan bisa berdarah lebih lama dari normal. Perdarahan setelah tindakan medis seperti sunat, cabut gigi, atau suntikan.
- 2. Perdarahan Spontan**
Tanpa sebab yang jelas, terjadi perdarahan di dalam tubuh, misalnya di otot atau sendi. Ini bisa menyebabkan rasa nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan gerak.
- 3. Memar yang Mudah Terjadi dan Besar**
Anak-anak sering terlihat memiliki lebam besar hanya karena benturan ringan.

4. Perdarahan Sendi (Hemartrosis)

Gejala khas hemofilia berat, terutama pada lutut, siku, dan pergelangan kaki. Jika berulang, bisa menyebabkan kerusakan sendi permanen dan disabilitas.

5. Perdarahan Internal

Bisa terjadi di otak (gejala: sakit kepala hebat, muntah, kejang, lemah di satu sisi tubuh), yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani.

Bagaimana Mengetahui Seseorang Mengidap Hemofilia?

- Riwayat Keluarga**
Jika ada anggota keluarga, terutama laki-laki, yang memiliki riwayat perdarahan yang tidak biasa, maka risiko hemofilia harus dipertimbangkan.
- Pemeriksaan Fisik dan Observasi Gejala**
Jika terjadi memar berulang, tentunya dokter akan memeriksakan adanya tanda-tanda perdarahan abnormal, dan segera mencari tahu penyebab memar yang tidak wajar atau pembengkakan sendi.
- Pemeriksaan Laboratorium**
Diagnosis hemofilia ditegakkan dengan uji darah khusus yang mengukur:
 - Waktu pembekuan darah (APTT biasanya memanjang)
 - Kadar faktor pembekuan darah (faktor VIII dan faktor IX)
 Hemofilia dibagi menjadi tiga tingkat keparahan berdasarkan kadar faktor pembekuan:
 - Berat: <1% dari kadar normal
 - Sedang: 1–5%
 - Ringan: 6–40%

Perawatan dan Kehidupan Penderita Hemofilia

Hingga saat ini, hemofilia belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Namun, dengan penanganan yang tepat, penderita hemofilia dapat



hidup sehat dan aktif. Berikut bentuk-bentuk perawatannya:

1. Terapi Pemberian Faktor Pembekuan

- Profilaksis (pencegahan): Pemberian rutin faktor pembekuan yang diberikan okeh fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum untuk mencegah perdarahan, biasanya dilakukan beberapa kali seminggu.
- On-demand: Pemberian faktor hanya saat terjadi perdarahan dimana penderita mengalami luka yang berat akibat jatuh atau bengkak pada sendi akibat aktivitas fisik maka penderita hemofilia dapat langsung berobat ke Rumah Sakit

terdekat.

2. Rehabilitasi dan Fisioterapi

Jika terjadi kerusakan sendi akibat perdarahan berulang, terapi fisik sangat penting untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mencegah disabilitas.

3. Edukasi dan Pendampingan

- Pasien dan keluarga harus mendapatkan edukasi tentang cara menangani perdarahan, mengenali tanda bahaya, dan menjaga aktivitas fisik yang aman.
- Sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial juga perlu diberi informasi agar penderita tidak dikucilkan dan penderita hemofilia dapat beraktivitas seperti selayaknya masyarakat normal.



Jelajah Peradaban Kuno Budaya Sumba

Di balik hamparan sabana yang luas dan langit biru yang membentang di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersembunyi jejak peradaban kuno yang masih hidup hingga hari ini. Kampung-kampung adat tetap memelihara tradisi leluhurnya dengan penuh kebanggaan.

Ya, mengunjungi dua kampung adat, Praijing dan Ratenggaro di Pulau Sumba, bagi penulis bukan sekadar perjalanan wisata, melainkan petualangan budaya yang membawa kita kembali ke masa silam. Harmoni antara manusia, alam, dan arwah nenek moyang dijaga dalam perilaku keseharian.

Rumah-rumah beratap rumbia (daun pohon sagu) yang tinggi menjulang, hingga upacara adat yang sarat makna, membuat setiap sudut kampung adat Sumba

menyimpan cerita, filosofi, dan warisan tak ternilai. Belum lagi hamparan persawahan yang menyejukkan mata. Inilah wajah lain NTT, eksotis, sakral, dan penuh pesona, yang menunggu untuk dijelajahi dengan hati terbuka.

Kampung Adat Praijing

Perjalanan penulis dimulai dengan mengunjungi Kampung Adat Praijing di Sumba Barat. Kampung ini tepatnya berada di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT. Lokasinya yang sekitar 3 kilometer dari pusat Kota

Waikabubak menjadikannya destinasi yang mudah diakses.

Untuk memasuki Kampung Adat Praijing, diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp25 ribu per orang. Dari loket, pintu masuk kampung adat praijing pengunjung langsung disuguhkan pemandangan yang membawa kita pada peradaban lama, zaman megalitikum seperti kuburan batu besar. Hal ini seolah menguatkan konsep 'Ma Rappu' atau kehidupan setelah kematian, yang menjadi inti dari budaya Sumba.

Rumah adat di Kampung Praijing, Sumba Barat berbentuk rumah panggung dengan menara tinggi yang menjulang ke langit beratap rumbia sebagaimana ciri khas yang unik dari adat Sumba. Rumah adat ini dikenal dengan dua nama, Uma Bokulu yang berarti rumah besar, dan Uma Mbatangu yang berarti rumah menara.

Rumah adat ini terbagi menjadi tiga zona utama. Lei Bangun adalah area kolong rumah yang digunakan

untuk memelihara ternak. Rongu Uma atau tingkat kedua, merupakan tempat tinggal utama. Sementara bagian puncak disebut Uma Daluku atau loteng, digunakan untuk menyimpan makanan dan alat-alat pusaka yang bernilai.

Sementara pembagian ruang dalam rumah adat di Kampung Adat Praijing sangat dipengaruhi kepercayaan "Ma rappu" yang dominan di kalangan masyarakat Sumba. Marappu artinya arwah (yang dimuliakan atau dipertuan), ini merupakan agama (kepercayaan) yang masih dianut oleh masyarakat Sumba hingga sekarang. Mereka percaya arwah leluhur yang mengawasi dan melindungi keturunan mereka dari menara rumah.

Dalam rumah adat Praijing terdapat empat tiang yang menopang rumah dan menara. Dua tiang merupakan pintu masuk bagi laki-laki, dua tiang lainnya sebagai pintu masuk bagi perempuan. Di antara empat tiang tersebut, terdapat perapian atau tempat memasak, ataupun mengawetkan bahan makanan yang disimpan di menara rumah.

Rumah adat di kampung Praijing ini awalnya berjumlah 42 rumah. Namun, sekitar tahun 2000 silam, kampung ini sempat mengalami kebakaran hebat, yang menghancurkan beberapa rumah adat. Hingga kini tersisa hanya 38 rumah adat. Di sini penulis juga mendapati beberapa inna atau ibu yang tengah menenun kain khas daerah tersebut dengan menggunakan alat tenun tradisional.

Pengunjung yang ingin memiliki kain tersebut bisa membelinya langsung dari inna tersebut. Tidak hanya itu, bagi pengunjung yang ingin berpose atau berfoto di rumah adat dengan mengenakan kain atau pakaian adat sumba, pengelola wisata kampung adat tersebut juga menyewakannya, lho.



Desa Ratenggaro

Kata Ratenggaro sendiri berasal dari kata 'rate' yang artinya kuburan, serta 'garo', nama suku dari desa tersebut. Konon terjadi perang antarsuku yang menyebabkan Suku Garo terbunuh oleh suku lain, dan akhirnya dikubur di tempat tersebut. Dari sanalah desa ini dikenal dengan nama Desa Ratenggaro.

Meski sejarah desa tersebut menyedihkan, namun desa ini menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa, ditambah keindahan alam ciptaan Sang Khalik. Desa ini berada di pesisir pantai yang sangat indah. Tak berlebihan, jika wisatawan yang datang ke desa adat Ratenggaro ini tidak hanya terpuaskan mata, namun ketenangan batin, mengingat di desa ini sangat tenang.

Secara umum, rumah adat Ratenggaro tidak berbeda dengan rumah adat Praijing. Desain arsitektur tradisional dapat terlihat dengan jelas, bahkan dari jarak yang cukup jauh. Rumah adat Ratenggaro menjadi rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Menara yang menjulang tinggi tersebut merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga fungsi rumah selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pemujaan.

Material rumah adat Ratenggaro terbuat dari kayu kadimbal atau kayu besi. Atap dari alang-alang kering, bambu, kahi kara (sejenis akar gantung). Untuk pengikat bangunan, mereka menggunakan rotan. Jadi, rumah mereka tidak mengandung unsur logam, baik paku untuk perekat maupun atap seng. Seluruh material diambil dari bahan alam di lingkungan sekitar.

Secara umum, rumah adat Ratenggaro berbentuk rumah panggung terdiri dari empat tingkat. Tingkat pertama diperuntukkan bagi hewan peliharaan. Tingkat kedua merupakan tempat tinggal penghuni rumah, dan tingkat berikutnya untuk menyimpan hasil panen. Kemudian di atas tempat memasak terdapat sebuah kotak yang merupakan tempat menyimpan benda keramat, dan tingkat teratas untuk meletakkan tanduk kerbau sebagai simbol tanda kemuliaan.

Rumah adat ini sejatinya lebih menyerupai rumah adat Flores dan Toraja. Terdapat rahang babi hutan lengkap dengan taringnya dan tanduk kerbau digantung di dalam atau pekarangan rumah. Ini sebagai simbol bahwa orang yang memiliki rumah tersebut pernah melaksanakan upacara adat.

 ayu/mh



TRADISI MUDIK ASYIK

Lebaran 2025

Narasi : Naefuroji

Foto : Runi, Jaka, Oji, Dev, Tari, faisal

Tasik... Garut... Bandung...!

Teriakan kondektur bus saling bersahutan memecah suasana Sabtu pagi (29/3/2025) lalu di sudut Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Nampak kepadatan calon penumpang mayoritas hendak mudik menjelang Hari Raya Idulfitri Tahun 2025.

Bagusnya, otoritas Terminal Kampung Rambutan juga membuka Pos Mudik Ramah Keluarga untuk memfasilitasi para pemudik yang membawa anak. Terminal Bus Poris Plawad di Kota Tangerang juga dipenuhi calon pemudik ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera.

Sistem pembelian tiket via online turut andil memudahkan penumpang mendapatkan armada bus

yang ditumpangi. Awak bus tertib, tak lagi nampak desak-desakan penumpang berebut masuk bus seperti dulu

Sementara itu, suasana keramaian arus mudik Lebaran 2025 di Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat juga terekam kamera Parlementaria, Rabu (26/3/2025) lalu. Terlihat petugas stasiun memegang papan nama kereta dan jam keberangkatan agar para penumpang tak ketinggalan kereta. Children Playground (area bermain anak) pun tersedia, menjadi tempat anak-anak melepas kepenatan.

Masih di hari yang sama, Rabu malam, tim Parlementaria juga ada yang mudik lebaran dengan kendaraan pribadi melewati Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) - Tol Layang MBZ - Tol Trans Jawa tujuan Pekalongan, Jawa Tengah. Kepadatan arus mudik didominasi kendaraan pribadi, bahkan beberapa menjadikan atap mobilnya sebagai bagasi alternatif.

Pemandangan tersebut seolah menjadi pertanda musim mudik telah tiba. Hingga pintu Tol Cikampek Utama, Karawang, terpantau ramai lancar. Sampai di Tol Cipali sesekali tersendat disebabkan kendaraan mogok di bahu jalan dan insiden kecelakaan. Sesampai di kampung halaman, Parlementaria juga memotret sederet tradisi masyarakat jelang lebaran. Salah satunya membuat lontong sebagai makanan pendamping opor ayam khas lebaran. Berbekal daun pisang digulung-gulung dan diisi beras secukupnya, lalu direbus dalam rendaman air matang beberapa jam dengan kayu bakar, menjadikan cita rasa yang berbeda. Tak lupa juga membuat keripik pisang untuk cemilan saat lebaran, memanfaatkan buah pisang yang tersedia di kebun. Allahu Akbar...! Malam takbiran di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci,

Tangerang, semakin semarak dengan pawai obor dan pukul bedug oleh Paguyuban Pemuda dan Pemuda Sangkuriang RT 02/03 pada Minggu malam (30/3/2025) lalu. Kegiatan ini diikuti ratusan warga yang antusias menyambut Hari Raya Idulfitri dengan penuh suka cita.

Tak ketinggalan, sebelum hari lebaran tiba tradisi ziarah kubur untuk mengenang kembali kerabat yang sudah lebih dahulu kepengkuan Illahi Rabbi. Tua, muda, dan anak-anak khusyuk memanjatkan doa di area pemakaman Kelurahan Ketapang, Cipondoh, Tangerang dan di Kampung Bulak Poncol, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Minggu (30/3/2025) silam.

Dan ketika Hari Kemenangan itu tiba, masyarakat muslim pun berbondong-bondong melaksanakan salat Idulfitri. Ada yang memanfaatkan lapangan hingga sepanjang jalan raya. Setelah sebulan lamanya berpuasa, menahan lapar dan dahaga, bermacam-macetan di jalan demi sampai ke kampung halaman. Berlebaran di kampung halaman adalah tradisi asyik yang dirindukan. Selamat Lebaran Mohon Maaf Lahir dan Batin. 🙏



FOTO: RINI HANUVEL



Situasi Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur nampak kepadatan penumpang hendak mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025, Sabtu pagi (29/3/2025).



FOTO: DEY/VEL



Keramaian arus mudik Lebaran 2025 di Stasiun Kereta Api Pasar Senen Jakarta Pusat juga terekam kamera Parlementaria, Rabu (26/3/2025). Terlihat petugas stasiun memegang papan nama kereta dan jam keberangkatan agar para penumpang tak ketinggalan kereta.



FOTO: OJI/VEL



Suasana Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Tol Layang MBZ dan Tol Trans Jawa. Kepadatan arus mudik didominasi kendaraan pribadi.



Membuat lontong sebagai makanan pendamping opor ayam khas lebaran. Tak lupa juga membuat keripik pisang untuk cemilan saat lebaran.



FOTO: OJ/VEL



Malam takbiran di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Tangerang, semakin semarak dengan digelarnya Pawai Obor dan pukul bedug oleh Paguyuban Pemuda dan Pemuda Sangkuriang RT 02/03 pada Minggu malam (30/3/2025).



FOTO: FAISAL JAWA/VEL



FOTO: JAKHAN/VEL

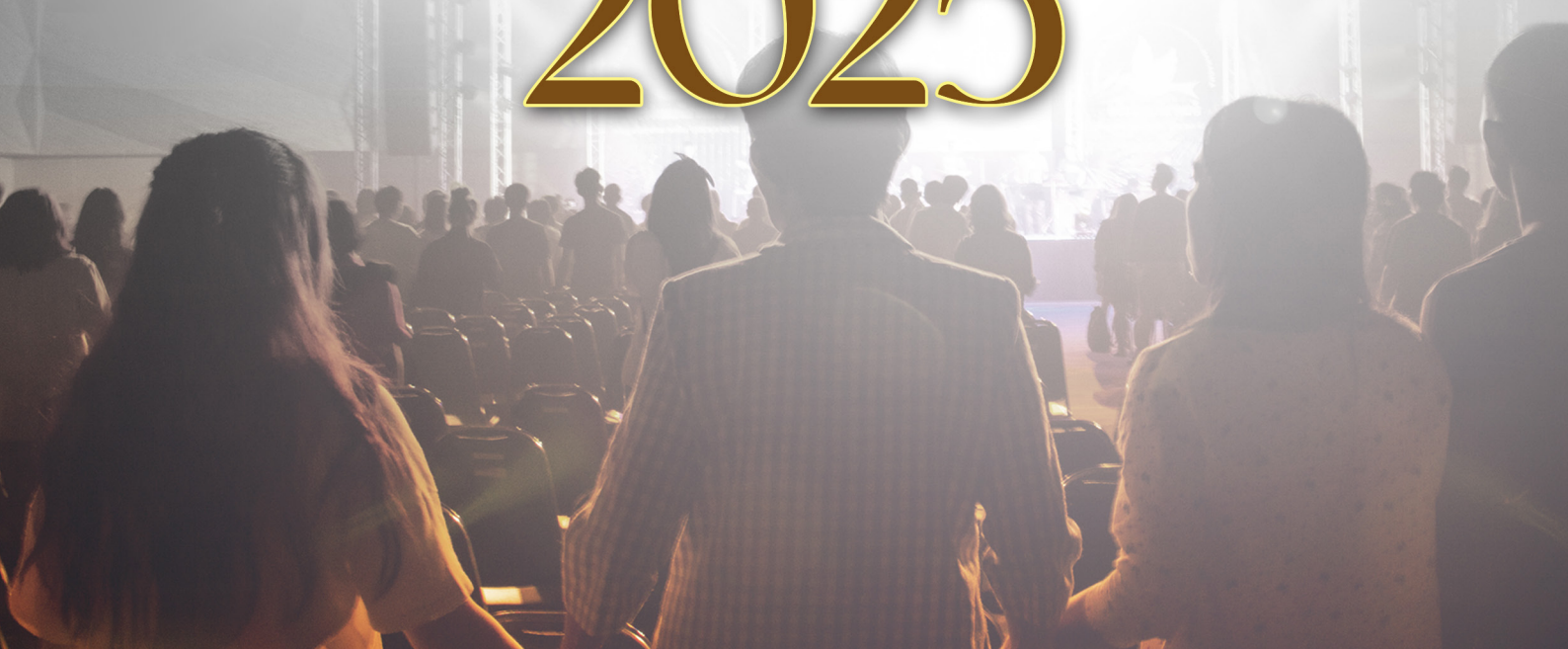


Tradisi ziarah kubur untuk mengenang kembali kerabat yang sudah lebih dahulu kepengkuan Illahi Rabbi. Tua, muda dan anak-anak khususyuk memanjatkan doa di area pemakaman Kelurahan Ketapang, Cipondoh, Tangerang dan di Kampung Bulak Poncol, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Kota Bekasi, Minggu (30/3/2025).



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
MENGUCAPKAN :

Selamat Hari Raya Paskah 2025



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri